



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

Jl HM. Sarbini No 89 Telp /Fax (0287)384434 Bumirejo Kebumen
Surel dinasperindag@kebumenkab.go.id Laman disperindagkukm.kebumenkab.go.id



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jln. HM. Sarbini No. 89 Kebumen Telp. 0287 – 384434 Fax.(0287) 384434
Email: disperindag@kebumenkab.go.id Web disperindag.kebumenkab.go.id ☒ 54316

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023.

Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Laporan Akuntabilitas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja pemerintahan dan pembangunan sesuai RKPD Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2021-2026. LKjIP ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi seluruh stakeholder mengenai pencapaian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan memberikan info kinerja terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran kinerja mencakup:

- 1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan, dan
- 2) tingkat pencapaian sasaran unit kerja yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

LKjIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Kebumen

yaitu Misi nomor 3 dan 6 yang telah dijabarkan ke dalam Renstra dan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen yang dituangkan dalam berbagai Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2023 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, juga dapat memberikan gambaran mengenai faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat pelaksanaan kegiatan.

LKjIP kami susun masih sempurna, kami membuka diri untuk menerima masukan, saran serta kritik yang positif dalam rangka untuk perbaikan/ penyempurnaan.

Kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan serta partisipasi dalam rangka penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini.

Harapan kami agar dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam LKjIP ini dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang, dan dapat bermanfaat untuk menjadi suatu informasi yang berguna bagi semua pihak yang memerlukan.

Kebumen, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN



Dis UDY CAHYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196702261986071001

IKHTISAR EKSEKUTIF

LKJIP sebagai laporan yang memuat perbandingan antara perencanaan dan hasil dari kinerja pemerintah daerah, secara sistematis menjabarkan rangkaian dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

. LKJIP ini merupakan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang merupakan sasaran dan target kinerja pemerintahan dan pembangunan sesuai RPJMD 2021-2026 yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

Capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel berikut :

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Persentase Koperasi Sehat dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang berkualitas	Meningkatnya kegiatan Koperasi sehat	Persentase Koperasi yang sehat	40,00	83,33	208,33	Sangat Baik
2		Meningkatnya kegiatan UMKM	Persentase Usaha Kecil Menengah yang berkualitas	10,89	12,42	114,05	Sangat Baik
3	Meningkatnya PDRB, ADHB Sektor Perindustrian	Meningkatnya persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT	Persentase Peningkatan PDRB sektor Perindustrian	5,79	12,00	207,25	Sangat Baik
4	Meningkatnya PDRB, ADHB Sektor Perdagangan	Meningkatnya daya saing perdagangan	Persentase Peningkatan PDRB sektor Perdagangan	5,14	9,21	179,18	Sangat Baik
	Rata-rata Capaian			15,46	29,24	177,20	Sangat Baik

Sebagaimana sasaran strategis yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen pada tahun anggaran 2023 mempunyai anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 37.620.802.850,- yang terbagi dalam 14

(empat belas) program, 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan. Secara keseluruhan realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan sebesar 100% sedangkan realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 36.415.504.369,- atau 96,80%. Pencapaian realisasi fisik dan realisasi keuangan pada skala kategori penilaian Baik. Sedangkan rata-rata capaian kinerja sasaran dengan nilai 177,20% predikat sangat baik.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi	1
1.2 Struktur Organisasi dan Kelembagaan	3
1.3 Tugas Pokok, dan Fungsi	6
1.4 Sumber Daya Manusia	11
1.5 Fungsi Strategis	13
1.6 Permasalahan Utama (strategic issued) yang Dihadapi	15
1.7 Landasan hukum	19
1.8 Sistematika	21
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 Rencana Strategis	22
2.1.1 Pernyataan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Kebumen	22
2.1.2 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Strategi dan Kebijakan Organisasi	24
2.1.3. Kebijakan Organisasi	24
2.2. Rencana Kerja	25
2.3. Perjanjian Kinerja	31
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	37
3.2. Realisasi Anggaran	60
BAB IV. PENUTUP	74
IV.1. Tunjauan Umum Capaian Kinerja	74
IV.2. Permasalahan/Kendala	75
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Depan	76
LAMPIRAN – LAMPIRAN	80
1. Perjanjian Kinerja	
2. Anggaran dan realisasi Belanja	
3. Prestasi yang telah dicapai tingkat Provinsi atau Nasional	
4. Lain-lain yang dianggap perlu	

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 1.1. Data Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Menurut Status Kepegawaian Tahun 202	11
Tabel 1.2 Data Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Menurut Pendidikan Tahun 2023	11
Tabel 1.3. Data Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Menurut Jabatan Tahun 2023	12
Tabel 1.4. Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	12
Tabel 1.5. Keselarasan RPJMD Kabupaten Kebumen dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah	13
Tabel 1.6 Keselarasan RPJMD Kabupaten Kebumen dengan RPJM Nasional	13
Tabel 1.7 Cascading Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi	14
Tabel 1.8 Identifikasi Permasalahan dan Tindak Lanjut Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen	18
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	23
Tabel 2.2. Rencana Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023	26
Tabel 2.3. Rencana Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dan Tahun 2023	28
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023	31
Tabel 2.5. Program dan Kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023.	32
Tabel 3.1 Skala Nilai Peningkatan Kinerja	37
Tabel 3.2. Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2023	38
Tabel 3.3. Nilai Ekspor Kabupaten Kebumen Tahun 2023	43
Tabel 3.4. Perkembangan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan tahun 2021 dan tahun 2022	44
Tabel 3.5. Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi;	45
Tabel 3.6. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	48
Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	55
Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan tahun 2023 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan	60

	HALAMAN
Menengah Kabupaten Kebumen	
Tabel 3.9 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Kebersihan Pasar, Retribusi tempat khusus parkir, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pelayanan Tera/ tera Ulang	64
Tabel 3.10. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana dari APBN DBHCHT di wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2023	67
Tabel 3.11 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023	69

DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen	5
Gambar 1.2. Pohon Masalah Urusan Perindustrian dan Perdagangan	16
Gambar 1.3 Pohon Masalah Urusan Koperasi	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Penyelenggaraan pemerintahan yang *Good Governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Akuntabilitas publik merupakan landasan utama bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Ini diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya. Akuntabilitas juga merupakan prasyarat mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan yang dapat diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran dan hasil yang sebesar mungkin.

Sejarah berdirinya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

1.1.1. Periode DINAS PENGELOLAAN PASAR (1997- 2004)

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kebumen No 10 Tahun 1997 tanggal 27 November 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen lebih di kenal Dinas Pengelolaan Pasar yang merupakan pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan pasar.

1.1.2. Periode DISPERINDAGKOP (2004 - 2016)

Pada tahun 2004 dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen yang secara khusus menetapkan pembentukan Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen sejak tanggal 1 Juli 2004 menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen dan lembar Daerah Kabupaten Kebumen No 33 Tahun 2004 Seri D Nomor 6.

1.1.3. Periode DISPERINDAG (2017 - 2021)

Pada akhir tahun 2016, perubahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebabkan perubahan struktur organisasi. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan diubah pada ketentuan Pasal 21, Pasal 22 tentang tugas Bidang Pengembangan Perdagangan dan pasal 24 tentang tugas Seksi Pengawasan Perdagangan dan Distribusi Barang. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 84 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.

1.1.4. Periode DISPERINDAGKUKM (2021 sampai dengan sekarang)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Dinas Perindustrian, Perdagangan menyatu dengan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, sehingga merger menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 maka menjalankan seluruh aktivitasnya Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

1.2. Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Pasal 4 telah disusun organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, diubah dengan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pasal 4 tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan, serta bidang koperasi usaha kecil dan menengah.

Struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen No 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah..

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menunjang kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen diperlukan struktur organisasi sebagai berikut:

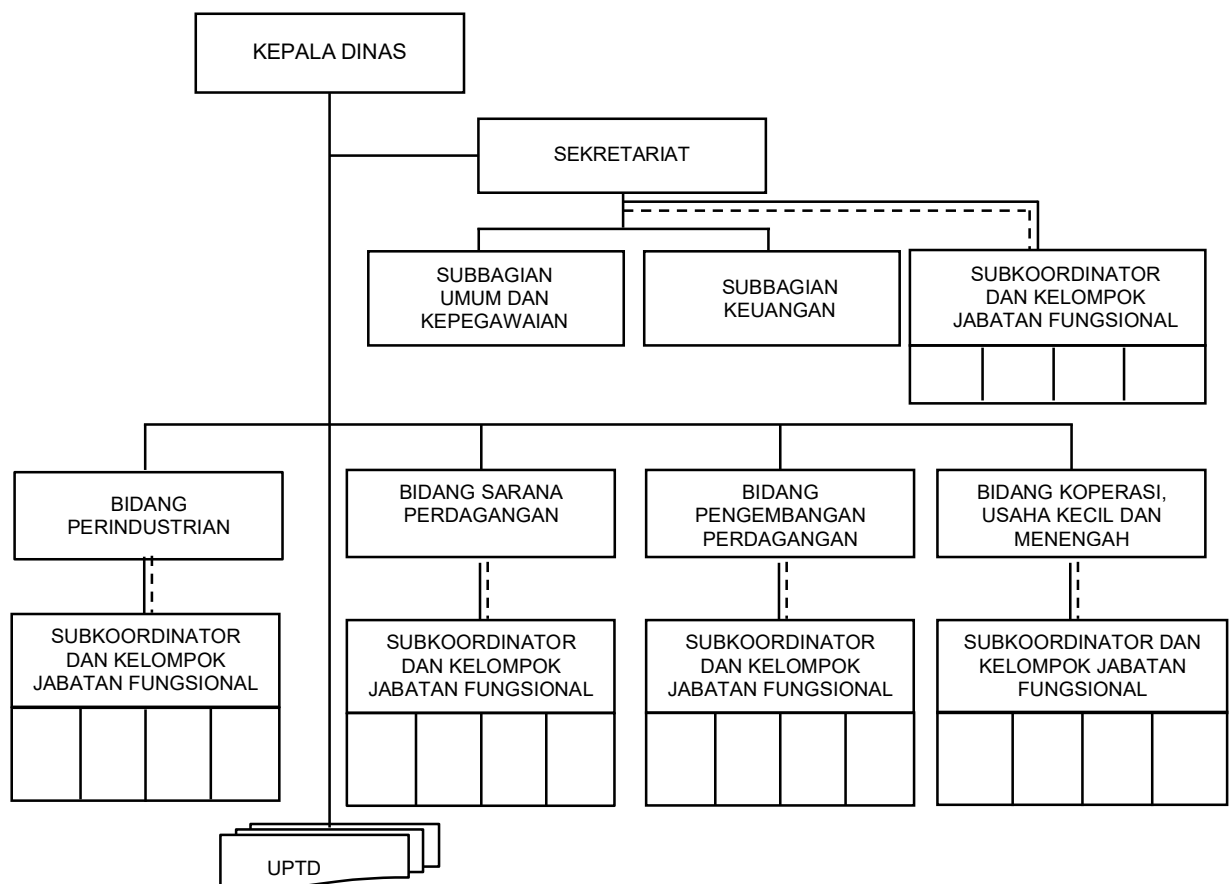
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub bagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Perindustrian
Susunan organisasi Bidang Perindustrian terdiri atas :
 - a. Sub koordinator Pengelolaan Informasi Industri
 - b. Sub koordinator Pembangunan Industri
 - c. Sub koordinator Pengendalian Industri
4. Bidang Sarana Perdagangan
Susunan organisasi Bidang Pengembangan Perdagangan terdiri atas :
 - a. Sub koordinator Pengelolaan Sarana Perdagangan;
 - b. Sub koordinator Pengembangan Sarana Perdagangan;
 - c. Sub koordinator Pemberdayaan Pengelola Sarana Perdagangan.
5. Bidang Pengembangan Perdagangan
Susunan organisasi Bidang Pengembangan Perdagangan terdiri atas :
 - a. Sub koordinator Bina Usaha Perdagangan;
 - b. Sub koordinator Promosi dan Informasi Perdagangan;
 - c. Sub koordinator Pengawasan Perdagangan
6. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Susunan organisasi Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas :
 - a. Sub koordinator Koperasi;
 - b. Sub koordinator Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. Sub koordinator Kelembagaan dan Informasi.
7. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)
Untuk Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) dibawah kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, terdiri atas :
 - a. UPTD Pasar I;
 - b. UPTD Pasar II;
 - c. UPTD Pasar III;
 - d. UPTD Pasar IV;
 - e. UPTD Metrologi Legal Kebumen.
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen No 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, tertuang pada peraturan tersebut diatas dan bagan organisasi tergambar pada bagan sebagaimana tertuang pada gambar 1.1.

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen



Sumber : Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen No. 119 Th. 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen No. 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut di atas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. perumusan kebijakan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

Untuk melengkapi dokumen ini perlu disampaikan penjabaran dari uraian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen yang selengkapya adalah sebagai berikut :

1.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana dan program di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;

2. perumusan kebijakan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
3. pelaksanaan koordinasi di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
4. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
5. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, sarana
6. perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
7. pelaksanaan administrasi Dinas;
8. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Dinas; dan
9. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

1.1.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas :

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian *mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.*
2. Sub bagian Keuangan mempunyai tugas *melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan.*
3. Sub koordinator Perencanaan *mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan.*

1.1.3 Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perindustrian..

Susunan organisasi Bidang Perindustrian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, meliputi :

- a. Sub koordinator Pengelolaan Informasi Industri *mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan informasi industri.*
- b. Sub koordinator Pembangunan Industri; *mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembangunan industri.*
- c. Sub koordinator Pengendalian Industri *mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian.*

1.1.4 Bidang Pengembangan Perdagangan

Bidang Sarana Perdagangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang sarana perdagangan dalam melaksanakan tugas Bidang Sarana Perdagangan.

Susunan organisasi Bidang Sarana Perdagangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, meliputi :

- a. Sub koordinator Pengelolaan Sarana Perdagangan *mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan sarana perdagangan.*
- b. Sub koordinator Pengembangan Sarana Perdagangan *mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan sarana perdagangan.*

- c. Sub koordinator Pemberdayaan Pengelola Sarana Perdagangan *mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemberdayaan pengelola sarana perdagangan.*

1.1.5 Bidang Pengembangan Perdagangan

Bidang Pengembangan Perdagangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan perdagangan dan distribusi barang, perdagangan dalam negeri dan pengembangan ekspor. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Perdagangan.

Susunan organisasi Bidang Pengembangan Perdagangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, meliputi

- a. Sub koordinator Bina Usaha Perdagangan *mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang bina usaha perdagangan.*
- b. Sub koordinator Promosi dan Informasi Perdagangan *mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang promosi dan informasi perdagangan..*
- c. Sub koordinator Pengawasan Perdagangan *mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengawasan perdagangan.*

1.1.6 Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi, pengawasan, pemeriksaan, penilaian kesehatan, pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi dan produksi, pemasaran,

pengembangan usaha, jaringan usaha dan kemitraan serta fasilitasi layanan dan pembiayaan usaha mikro.

Susunan organisasi Bidang, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, meliputi :

- a. Sub koordinator Koperasi *mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang koperasi.*
- b. Sub koordinator Usaha Kecil dan Menengah *mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang usaha kecil dan menengah.*
- c. Sub koordinator Kelembagaan dan Informasi *mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kelembagaan dan informasi.*

1.1.7 Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

1.1.8 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, Di lingkungan Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tim kerja serta pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2023 mempunyai pegawai sejumlah 244 (dua ratus empat puluh empat) personil dengan status kepegawaian terdiri dari PNS sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang P3K sebanyak 3 (tiga) orang dan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan (P2K) sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) orang yang dikelompokkan dalam 6 (enam) bidang tugas, yaitu Sekretariat, Bidang Perindustrian, Bidang Pengembangan Perdagangan, Bidang Sarana Perdagangan, dan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kondisi personil dilihat dari pengelompokan tugas, eselon, pendidikan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Data Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Menurut Status Kepegawaian Tahun 2023

Status Pegawai	Golongan																Kelas	Non Kelas	Jumlah	
	I				II				III				IV							
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	E			VII
CPNS																			0	
PNS				4		12	8	30	9	6	3	7	4	1	1				85	
P3K																	3		3	
P2K																		156	156	
Pendamping Kementerian																		2	2	
JUMLAH	0	0	0	4	0	12	8	30	9	6	3	7	4	1	1	0	0	3	158	246

Sumber : DISPERINDAG KUKM Tahun 2023

Tabel 1. 2 Data Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Menurut Pendidikan Tahun 2023

Pendidikan	Golongan																P3K/ VII	P2K/ Non Kelas	Jml
	I				II				III				IV						
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D			
SD				4															4
SLTP						7	5											2	14

Pendidikan	Golongan																P3K/ VII	P2K/ Non Kelas	Jml		
	I				II				III				IV								
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D				E	
SLTA						5	2	30	5	1										130	173
D I																					0
D II																					0
D III							1		4	1		1							3		10
Strata 1										4	3	5	1							18	22
Strata 2												1	3	1	1						6
Jumlah	0	0	0	4	0	12	8	30	9	6	3	7	4	1	1	0	0	3	150	238	

Sumber : DISPERINDAG KUKM Tahun 2023

Tabel 1. 3 Data Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Menurut Jabatan Tahun 2023

Jabatan	Eselon				Non Eselon	Jumlah
	I	II	III	IV		
Struktural		1	5	8		14
Fungsional Tertentu					11	11
Fungsional Umum					113	113

Sumber : DISPERINDAG KUKM Tahun 2023

Tabel 1. 4 Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Menurut Jenis Kelamin

NO	URAIAN	PNS		NON PNS		JUMLAH
		PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretariat Dinas	8	5	3	0	16
3	Bidang Perindustrian	1	4	2	2	8
4	Bidang Pengembangan Perdagangan	1	3	5	5	14
5	Bidang Sarana Perdagangan	3	1	7	1	12
6	Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2	2	9	7	20
7	UPTD Pasar I	13	1	21	1	36
8	UPTD Pasar II	11	1	40	4	56
9	UPTD Pasar III	10	1	21	2	34
10	UPTD Pasar IV	14	0	16	1	31
11	UPTD Metrologi Legal	4	2	2	0	8
12	Petugas Pendamping Kementerian			1	1	2
	JUMLAH	68	20	127	23	238
	PROSENTASE	29%	8%	53%	10%	100

Sumber : DISPERINDAG KUKM Tahun 2023

1.5. Fungsi Strategis

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, mempedomani RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024, dan RPJPD Kabupaten Kebumen

Tahun 2005-2025, keselarasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 5 Keselarasan RPJMD Kabupaten Kebumen dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah

No	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
Visi		
	Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi	Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat
Misi		
3	Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	Misi 3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2021-2026

Sedangkan untuk keselarasan antara RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 6 Keselarasan RPJMD Kabupaten Kebumen dengan RPJM Nasional

No	RPJM Nasional Tahun 2020-2024	RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
Visi		
	Terwujudnya Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat
Misi		
3	Pembangunan yang merata dan berkeadilan	Misi 3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Visi Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan permasalahan utama yang dihadapi lima tahun kedepan

berdasarkan RPJMD Kabupaten Kebumen. Visi Kabupaten Kebumen adalah **Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat**, hasil dari masalah utama yang dihadapi kemudian dibuat menjadi pokok-pokok visi :

Tabel 1. 7 Cascading Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran		Strategi	
1	VISI	Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat		
2	MISI 3	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan		
3	Tujuan 3.1	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah		
4	Sasaran 3.1.2	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	Strategi 3.1.2	Pengembangan usaha kecil dan industri padat karya
5	Sasaran 3.1.3	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	Strategi 3.1.3	Peningkatan daya saing perdagangan dan daya tarik pariwisata

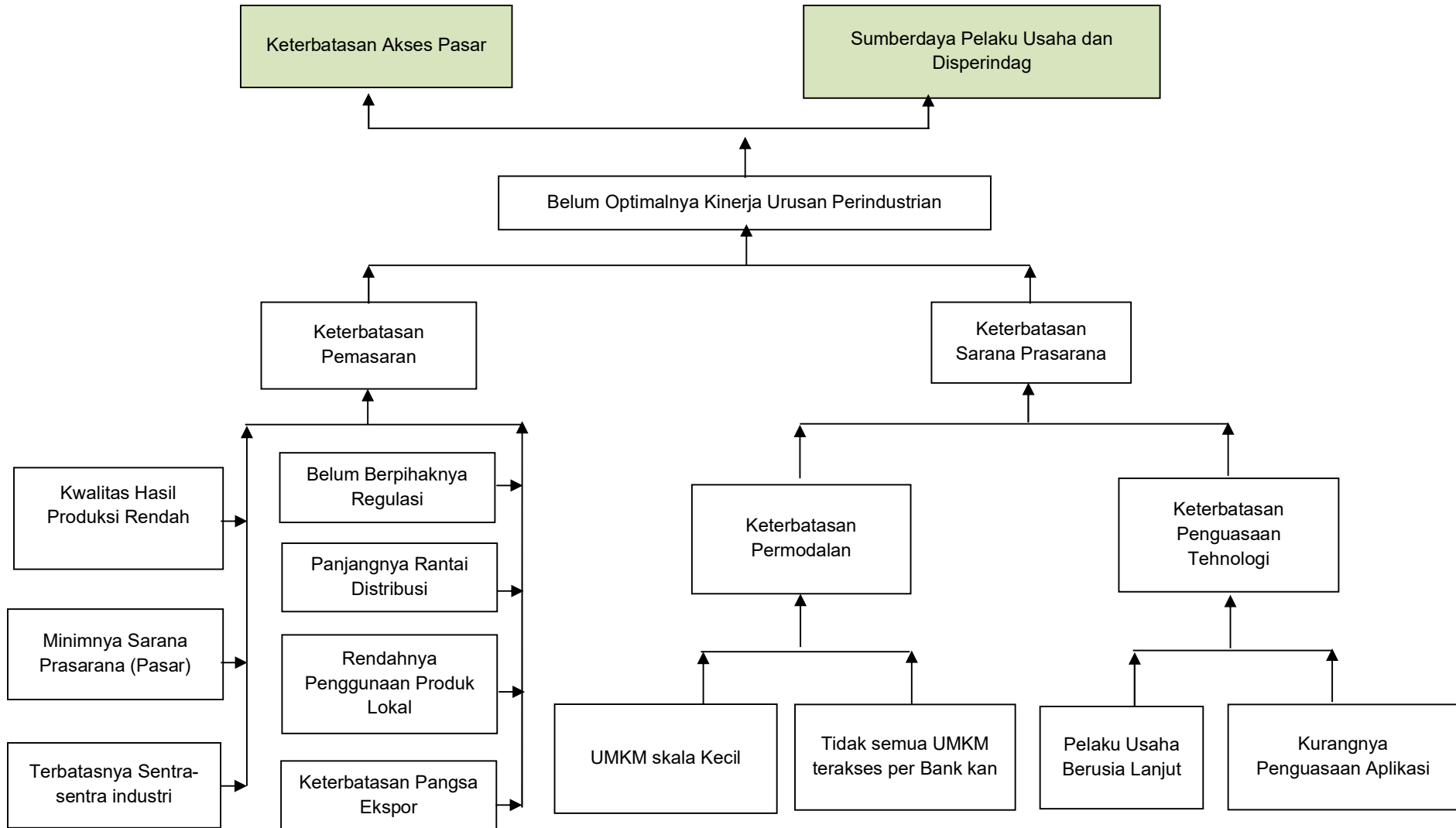
Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja terkait pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Sedangkan strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah.

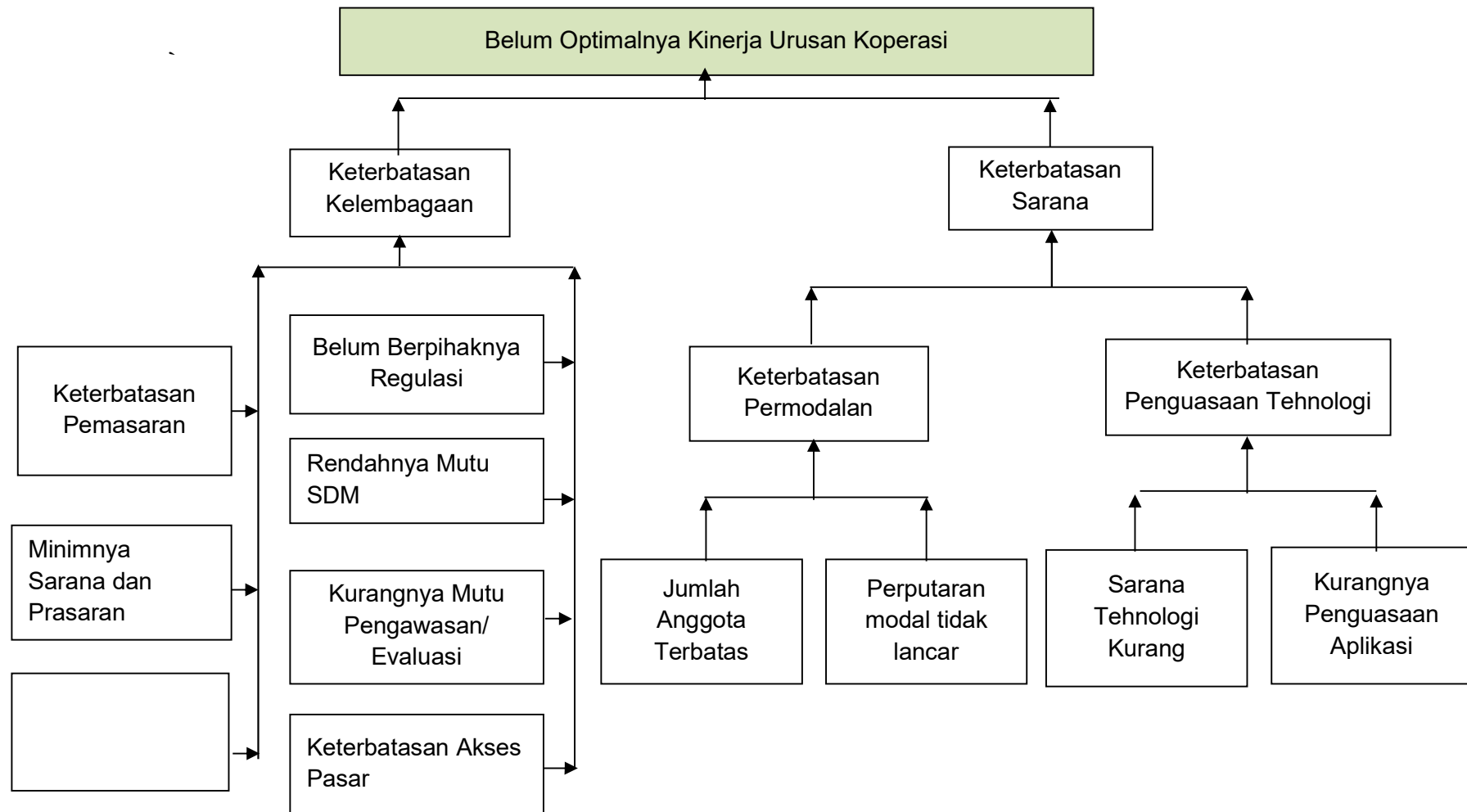
1.6. Permasalahan Utama (strategic issued) yang Dihadapi

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut teridentifikasi permasalahan yang dihadapi seperti yang terlihat pada pohon masalah dibawah ini:

Gambar 1. 2 POHON MASALAH URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Gambar 1. 3 POHON MASALAH URUSAN KOPERASI



Tabel 1. 8 Identifikasi Permasalahan dan Tindak Lanjut Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

No	Permasalahan	Tindak Lanjut
1.	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Publik (SPP)	Pengadaan sarana prasarana penunjang layanan secara berkala dan upaya dalam melakukan memperbaiki/ pemeliharaan guna meningkatkan kualitas layanan.
2.	Belum optimalnya penataan arsip dan dokumentasi secara komprehensif	Adanya penataan arsip dan monitoring arsip secara bertahap.
3.	Belum terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban kerja (ABK)	Identifikasi dan pemetaan kebutuhan serta pengadaan SDM untuk memenuhi standarisasi dan kompetensi sesuai ANJAB dan ABK
4	Masih banyaknya produk Industri yang belum memenuhi standar	Melaksanakan Penyuluhan, Pelatihan, Fasilitasi perizinan bantuan sarana dan prasana kepada IKM sehingga produk dihasilkan memenuhi standar
5	Masih terbatasnya ketersediaan SDM Kompetensi	Melaksanakan pembekalan kepada calon tenaga kerja sesuai kompetensi industri kepada masyarakat.
6	Belum optimalnya inovasi teknologi industri	Melakukan inovasi teknologi industri bagi IKM untuk memenuhi kapasitas dan standar produk
7	Belum Adanya Sentra-sentra industri dan Kawasan industri di wilayah Kebumen	Menggali potensi alam dan SDM di wilayah Kebumen dan merancang terbentuknya kawasan industri di Kabupaten Kebumen menjadi lebih semarak
8	Kurangnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana industri, serta infrastruktur penunjang yang berwawasan lingkungan	Pihak swasta dan pemerintah untuk bisa mendukung ketersediaan sarana dan prasarana industri, serta infrastruktur penunjang yang berwawasan lingkungan
9	Belum optimalnya keterkaitan sektor industri dengan sektor lainnya	Pihak swasta dan pemerintah bekerjasama dalam mengoptimalkan sektor yang mendukung tumbuh kembangnya industri di Kebumen melalui program kemitraan dalam memenuhi kebutuhan
10	Keterbatasan Pemasaran hasil produksi UMKM	Memberikan wawasan regulasi pemasaran kepada IKM, memotong rantai distribusi dengan fasilitasi oleh pemerintah kepada UMKM, dan meningkatkan penggunaan produk lokal dengan pelatihan, mengadakan promosi produk IKM, melaksanakan

No	Permasalahan	Tindak Lanjut
		seminar dan pelatihan ekspor kepada UMKM
11	Keterbatasan Permodalan bagi KUKM	Pemerintah, koperasi dan swasta memberikan bantuan modal atau subsidi kepada IKM untuk meningkatkan kapasitas produksi agar lebih maju
12	Keterbatasan Penguasaan Teknologi KUKM	Pemerintah memberikan pendampingan dan pelatihan manajemen berbasis IT kepada IKM dalam memanfaatkan teknologi menyongsong industri 4.0 go digital;
13	Kurangnya Mutu Pengawasan/Evaluasi perkoperasian	Melaksanakan pengawasan/evaluasi secara berkala dan berkelanjutan kepada IKM, dan penjaminan mutu

1.7. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan:

- 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
- 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 8 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- 14 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 154 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Dan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- 15 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- 16 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 154 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Dan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- 17 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- 18 Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar;

- 19 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal.
- 20 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

1.8. Sistematika

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Gambaran Umum Organisasi

1.1.1 Sejarah Singkat DISPERINDAGKUKM Kabupaten Kebumen

1.1.2 Struktur Organisasi

1.1.3 Tugas Pokok, dan Fungsi

1.1.4 Sumber Daya Manusia

1.1.5 Sarana Prasarana

I.2. Fungsi Strategis

I.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

II.1. Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis (Renstra)

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

II.2. Perjanjian Kinerja

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Capaian Kinerja Organisasi

III.2. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

IV.1. Tunjauan Umum Capaian Kinerja

IV.2. Permasalahan/Kendala

IV.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Depan

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2. 1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten Kebumen dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2021 – 2026.

Penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan. Renstra secara sistematis memprioritaskan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

2.1.1. Pernyataan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Kebumen

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Kabupaten Kebumen tahun 2021 – 2026 adalah **“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**.

Dari Visi diatas dijabarkan ke dalam beberapa Misi yang akan dicapai selama 5 tahun ke depan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen mendukung Misi Kepala Daerah periode 2021-2026, misi yang ke 3 (tiga) yaitu : **“Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam,**

pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan"

Untuk mencapai sasaran tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen fokus pada tiga hal, yaitu (1) Perbaikan tata Kelola (*Governance*), (2) Perbaikan pengelolaan risiko (*Risk*), dan (3) Perbaikan pengendalian intern (*Control*).

Untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka dirumuskan secara sistematis program-program yang akan dilaksanakan. Program-program yang ada dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas dapat digambarkan sebagai berikut ini :

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, Pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya PDRB ADHK sektor Perindustrian	Meningkatnya pertumbuhan usaha industri	Persentase Peningkatan PDRB ADHK sektor Perindustrian	%	8,31	6,15	5,79	5,47	5,19	4,93
		meningkatnya PDRB ADHK sektor Perdagangan	Meningkatnya daya saing perdagangan	Persentase Peningkatan PDRB ADHK sektor Perdagangan	%	10,30	5,42	5,14	4,89	4,66	4,45
		Meningkatkan Persentase koperasi sehat dan usaha Mikro Kecil Menengah yang Berkualitas	Meningkatnya jumlah koperasi sehat	Persentase koperasi sehat	%	6,67	33,33	0,00	6,67	53,33	3,33
			Meningkatnya jumlah UMKM berkualitas	Persentase Usaha Kecil Menengah yang berkualitas	%	0,75	10,27	0,89	1,76	12,31	3,22

2.1.2. Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Strategi dan Kebijakan Organisasi

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen mendukung misi ketiga (3), untuk keberhasilan tersebut perlu

ditetapkan tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

- a. Meningkatkan persentase koperasi sehat dan usaha mikro kecil dan menengah
- b. Meningkatnya PDRB ADHK Sektor Perindustrian
- c. Meningkatnya PDRB ADHK Sektor Perdagangan

Dalam rangka mendukung misi “**Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan**”, terdapat beberapa sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen yaitu :

- a. Meningkatnya Jumlah Koperasi sehat
- b. Meningkatnya Jumlah UMKM berkualitas
- c. Meningkatnya Pertumbuhan usaha Industri
- d. Meningkatnya daya saing Perdagangan

Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen untuk membantu pemerintah dalam mengembangkan sektor industri, perdagangan, dan koperasi di daerahnya, yaitu :

- a. Meningkatnya koperasi sehat
- b. Pengembangan usaha kecil dan industri padat karya
- c. Meningkatnya pertumbuhan usaha industri
- d. Peningkatan daya saing perdagangan dan daya tarik pariwisata.

2.1.3. Kebijakan Organisasi

- a. pemeliharaan dan pengawasan koperasi
- b. pendidikan dan pelatihan koperasi
- c. pemberdayaan dan perlindungan koperasi
- d. Melakukan revitalisasi sarana dan prasarana PLUT
- e. Membuat program inkubasi bagi pelaku usaha pemula
- f. Membuat database industri, perdagangan, dan pasar yang valid dan update secara berkala.

- g. Pengembangan ketrampilan dan kualitas SDM tenaga kerja melalui pelatihan;
- h. Peningkatan penguasaan teknologi modern dan inovasi produk melalui bantuan mesin/peralatan produksi;
- i. Meningkatnya daya saing produk industri kecil dan menengah (IKM) yang berbasis sumber daya lokal baik pengolahan hasil pertanian maupun non pertanian untuk meningkatkan perekonomian daerah.
- j. Memberikan fasilitasi dan informasi pameran di tingkat lokal, jawa, dan luar jawa bagi IKM untuk memperluas jaringan bisnis, promosi untuk memasarkan produk unggulan dan meningkatkan omset penjualan bagi IKM;
- k. Sosialisasi kepada petani yang bekerjasama dengan dinas terkait agar petani dapat memanfaatkan gudang dengan sistem resi gudang (SRG) supaya dapat berfungsi secara optimal dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukung.
- l. Pembinaan, penataan, dan pemberian fasilitas bagi pedagang kaki lima serta penyusunan regulasi tentang PKL di Kabupaten Kebumen.
- m. Revitalisasi pasar rakyat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan pasar yang diharapkan dapat merubah tampilan pasar rakyat menjadi lebih bersih, aman, nyaman, dan teratur sehingga dapat bersaing dengan pasar modern.

2.2. Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (*quantitative objectives*) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Kebumen. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja. Rencana Kinerja Tahunan 2023 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Pada dasarnya RKT 2023 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen selama tahun 2023. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2023 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan. Target sasaran untuk Tahun 2023 merupakan target tahun Kedua dari Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Capaian Tahun 2023
1	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, Pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya PDRB ADHK sektor Perindustrian	Meningkatnya pertumbuhan usaha industri	Persentase Peningkatan PDRB ADHK sektor Perindustrian	%	5,79
		Meningkatnya PDRB ADHK sektor Perdagangan	Meningkatnya daya saing perdagangan	Persentase Peningkatan PDRB ADHK sektor Perdagangan	%	5,14
		Meningkatkan Persentase koperasi sehat dan usaha Mikro Kecil Menengah yang Berkualitas	Meningkatnya jumlah koperasi sehat	Persentase koperasi sehat	%	40,00
			Meningkatnya jumlah UMKM berkualitas	Persentase Usaha Kecil Menengah yang berkualitas	%	10,89

Untuk melaksanakan kebijakan yang telah diambil maka perlu dijabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang telah disusun, diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan mengalokasikan sumber daya organisasi.

Rencana Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dan Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Rencana Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Program		Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran 2022 (Rp)	Anggaran 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	270,000,000	20.000.000
2	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	2	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	213,978,000	277.287.000
3	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	3	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	277,834,000	445.730.000
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	4	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	4	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	164,139,000	30.000.000
				5	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	224,956,000	40.000.000
				6	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	624,200,000	1.766.560.000
5	Program Pengembangan UMKM	5	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	7	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1,746,122,000	2.058.007.000
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	33.554.000
				9	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	15.000.000
		7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,810,198,000	9.836.916.850
				11	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	127,730,000	97.108.000
		8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	105,000,000	35.000.000
				13	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	75,000,000	0
		9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	14	Penyediaan Komponen Instalasi	25,000,000	12.600.000

No	Program		Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran 2022 (Rp)	Anggaran 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
				15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45,000,000	20.000.000
				16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	205,407,000	80.000.000
				17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,000,000	0
				18	Penyediaan Bahan/Material	63,008,000	15.000.000
				19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64,824,000	48.000.000
				20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15,000,000	4.000.000
		10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21	Pengadaan Mebel	0	0
				22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		20.000.000
				23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000	0
		11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,995,000	3.000.000
				25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	514,000,000	623.395.000
				26	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73,496,000	16.000.000
				27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20,000,000	8.000.000
		12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200,000,000	142.708.000
				29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,000,000	40.000.000
7	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	13	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	30	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1,665,000,000	16.172.707.000
				31	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1,879,602,000	2.204.700.000
		14	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	32	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	750,000,000	599.432.000
				33	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	350,000,000	356.857.000
8	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	15	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	34	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	250,000,000	114.544.000
		16	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	35	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem	623,408,000	103.683.000

No	Program		Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran 2022 (Rp)	Anggaran 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
					Informasi Perdagangan		
9	Program Pengembangan Ekspor	17	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	250,000,000	325.366.000
10	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	18	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	37	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	350,000,000	173.754.000
11	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	19	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	38	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	300,000,000	639.474.000
12	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	20	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	39	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	75,000,000	55.500.000
				40	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	17,261,000	137.000.000
				41	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	100,000,000	96.000.000
				42	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	684,739,000	830.000.000
13	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	21	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	43	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	250,000,000	80.366.000
14	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	22	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	44	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	100,000,000	43.554.000

2.3. Perjanjian Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Tabel Penetapan Kinerja dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan : Meningkatkan Kegiatan ekonomi Sektor sekunder								
1	Meningkatkan persentase koperasi sehat dan usaha kecil Menengah yang berkualitas	Persentase Koperasi Sehat	%	40,00				40,00
		Persentase Usaha Kecil Menengah yang Berkualitas	%	10,89				10,89
2	Meningkatnya PDRB ADHB Sektor Perindustrian	Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perindustrian	%	5,79				5,79
Tujuan : Meningkatkan Kegiatan ekonomi Sektor tersier								
3	Meningkatnya PDRB ADHB Sektor Perdagangan	Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perdagangan	%	5,14				5,14

Pada tahun anggaran 2023, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen melaksanakan 14 program dengan rincian belanja sebagai berikut :

1. Belanja operasi sebesar Rp. 19.826.135.000,00;
2. Belanja Modal sebesar Rp 8.006.865.000,00 .

Setelah melalui mekanisme perubahan APBD 2023 anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen mengalami perubahan sebagai berikut

1. Belanja operasi sebesar Rp. 21.384.387.850,00;
2. Belanja modal sebesar Rp. 16.236.415.000,00

Hal ini adanya peningkatan sebesar 35,17%. Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai program-program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung tercapainya target perjanjian kinerja tahun 2023, dilaksanakan 14 program dan 22 kegiatan dengan pagu anggaran sebagaimana tabel 2.5. berikut ini.

Tabel 2. 5 Program dan Kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023.

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN
A	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	%	40	20.000.000	20.000.000
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi akuntabel	Koperasi	80	20.000.000	20.000.000
B	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	%	23,71	277.287.000	277.287.000
1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang diselenggarakan	Kegiatan	4	277.287.000	277.287.000
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Advokasi kepada Koperasi	%	29,59	445.730.000	445.730.000
1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	koperasi	120	445.730.000	445.730.000
D	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	11.030.281.850	11.050.281.850

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun + jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	16	33.554.000	48.554.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	12	9.934.024.850	9.934.024.850
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah kegiatan diklat dalam satu tahun	Kegiatan	8	35.000.000	35.000.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Bulan	12	179.600.000	179.600.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	buah	7	20.000.000	20.000.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	650.395.000	650.395.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional atau lapangan + jumlah unit peralatan dan mesin lainnya terpelihara	Unit	66	182.708.000	182.708.000
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas	%	10,89	1.836.560.000	1.836.560.000
1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang terbina	Unit Usaha	308	1.836.560.000	1.836.560.000
F	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya	%	40	2.058.007.000	2.058.007.000
1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UKM yang meningkat skala usahanya	Unit Usaha	225	2.058.007.000	2.058.007.000
G	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Nilai Pendapatan Retribusi Pasar	miliar	12,42	3.907.831.000	19.333.696.000
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang	Unit	8	2.951.542.000	18.377.407.000

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN
		dikelola				
2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan dan pemberdayaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan	8	956.289.000	956.289.000
H	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Inflasi Barang Kebutuhan Pokok pada Pasar	%	1,5	218.227.000	218.227.000
1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	Kegiatan	329	114.544.000	114.544.000
2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah hari pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	Hari	365	103.683.000	103.683.000
I	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Perdagangan	miliar	2.000	325.366.000	325.366.000
1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Promosi Pengembangan Usaha Produk Ekspor	Kegiatan	2	325.366.000	325.366.000
J	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang Tertera	%	58,88	173.754.000	173.754.000
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal	UTTP	3.035	173.754.000	173.754.000
K	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Pemasaran Produk UMKM	%	70,27	639.474.000	639.474.000
1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah kegiatan Pemasaran Produk dalam negeri	Kegiatan	6	639.474.000	639.474.000
L	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Produksi Gula Kelapa dan Rokok Bercukai	%	15,13	405.907.000	1.118.500.000
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Industri yang terbina		300	405.907.000	1.118.500.000
M	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perizinan yang Terfasilitasi	%	100	80.366.000	80.366.000

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN
1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perizinan industri yang terfasilitasi	Dokumen	60	80.366.000	80.366.000
N	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Dokumen Informasi Industri	Dokumen	1	43.554.000	43.554.000
1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Data Industri	Dokumen	1	43.554.000	43.554.000
Jumlah Total					21.462.344.850	37.620.802.850

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kerangka Pengukuran kinerja di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penggunaan anggaran yang melaporkan progres mengenai pencapaian kinerja dan evaluasi serta analisa terhadap pengukuran kinerja.

1. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasinya. Kerangka pengukuran menggunakan rumus pengukuran kinerja sebagai berikut :
2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

3. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi kinerja yaitu:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peningkatan Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	$\geq 85 - 100\%$	Baik
3	$\geq 65 - 85\%$	Cukup
4	$\geq 50 - 65\%$	Kurang
5	Kurang dari 50%	Sangat Kurang

Permenpan RB RI No.53 Tahun 2014

Pengukuran kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dengan menetapkan penetapan indikator kinerja, penentuan capaian kinerja. Kemudian dievaluasi dan dianalisis akuntabilitas kinerjanya, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dan langkah-langkah efisiensi yang telah dilaksanakan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pengawasan. Untuk mengukur capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2023, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan

kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang seluruhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Pada tahun 2023, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam upaya pencapaian kinerja indikator sasaran yang diampu. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sasaran strategis yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan yaitu;

1. Meningkatnya Jumlah Koperasi sehat;
 2. Meningkatnya Jumlah UMKM berkualitas
 3. Meningkatnya Pertumbuhan usaha Industri
 4. Meningkatnya daya saing Perdagangan
1. Pengukuran kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dengan membandingkan target dan realisasi kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 2 Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Persentase Koperasi Sehat dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang berkualitas	Meningkatnya kegiatan Koperasi sehat	Persentase Koperasi yang sehat	40,00	83,33	208,33	Sangat Baik
2		Meningkatnya kegiatan UMKM	Persentase Usaha Kecil Menengah yang berkualitas	10,89	12,42	114,05	Sangat Baik
3	Meningkatnya PDRB, ADHB Sektor Perindustrian	Meningkatnya persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT	Persentase Peningkatan PDRB sektor Perindustrian	5,79	12,00	207,25	Sangat Baik
4	Meningkatnya PDRB, ADHB Sektor Perdagangan	Meningkatnya daya saing perdagangan	Persentase Peningkatan PDRB sektor Perdagangan	5,14	9,21	179,18	Sangat Baik
	Rata-rata Capaian			15,46	29,24	177,20	Sangat Baik

Berdasarkan tabel 3.2 dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Kebumen pada Tahun 2023 telah mencapai keberhasilan, berdasarkan realisasi tingkat capaian kinerja dari setiap indikator secara umum menunjukkan capaian kinerja dengan kategori sangat baik. Capaian kinerja sebesar 153,04% tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan efisien dengan berpedoman pada target dan progres yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Operasional (RKO) serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Meningkatnya kegiatan Koperasi sehat

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kegiatan Koperasi sehat Tahun 2023 untuk mendukung capaian tujuan yang merupakan sasaran daerah yaitu meningkatkan kegiatan ekonomi sektor sekunder dapat dilihat pada tabel 3.2.

Dalam pelaksanaan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di tahun 2023 mempunyai target penilaian sebanyak 30 koperasi, dengan mengambil sampel sebanyak 30 koperasi untuk dilakukan penilaian. Hasil penilaian koperasi dalam satu tahun berjalan dari 30 koperasi terdapat 25 koperasi sehat, 5 koperasi cukup sehat, dan tidak terdapat koperasi dalam pengawasan maupun pengawasan khusus. Sehingga indikator persentase koperasi sehat dapat diperoleh perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Koperasi Sehat} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% = \frac{25}{30} \times 100\% = 83.33 \%$$

Indikator kinerja Persentase Koperasi yang sehat di Kabupaten Kebumen telah tercapai sebesar 83,33 % bahkan melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 40%, dengan kategori sangat baik.

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kegiatan koperasi sehat dari data diatas dapat diperoleh dengan menggunakan formulasi Pengukuran, sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% = \frac{83,33}{40} \times 100\% = 208.33\%$$

Nilai realisasi target persentase koperasi sehat sebesar 88,33 % dengan target sebesar 40% maka diperoleh capai indikator kinerja sasaran meningkatnya jumlah koperasi sehat sebesar 208,33% lebih tinggi dari tahun 2022 sebesar 110,02% atau naik sebesar 98,30%.

Perkoperasian di Kabupaten Kebumen yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian meningkatkan SDM perkoperasian tidak lepas dari pematuhan prinsip koperasi, pengelolaan keuangan yang baik,

diversifikasi usaha, pengembangan produk dan layanan, peningkatan keanggotaan, partisipasi anggota.

Meningkatnya kegiatan UMKM

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kegiatan UMKM Tahun 2023 untuk mendukung capaian tujuan yang merupakan sasaran daerah yaitu meningkatkan kegiatan ekonomi sektor sekunder dapat dilihat pada tabel 3.2.

Dalam pelaksanaan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di tahun 2023 mempunyai target UKM yang tersertifikasi sebanyak 891 UKM, dengan UKM tersertifikasi sebanyak 1216 UKM yang difasilitasi dinas maupun sertifikasi secara mandiri yang dilakukan oleh UKM. Sehingga indikator Persentase Peningkatan UKM yang Berkualitas dapat diperoleh perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas}}{\text{Jumlah UKM yang bersertifikat tahun (n) - Jumlah UKM yang bersertifikat tahun (n - 1)}} \times 100 \%$$

$$\text{Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas} = \frac{19.925 - 1.485}{1.485} \times 100\% = 12,42\%$$

Indikator kinerja Persentase Peningkatan UKM yang Berkualitas di Kabupaten Kebumen telah tercapai sebesar 12,42% bahkan melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 1,53%, dengan kategori sangat baik.

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kegiatan UMKM dari data diatas dapat diperoleh dengan menggunakan formulasi Pengukuran, sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% = \frac{12,42}{10,89} \times 100\% = 114,05\%$$

Nilai realisasi target Persentase Usaha Kecil Menengah yang berkualitas sebesar 12,42% dengan target sebesar 10,89 % maka diperoleh capai indikator kinerja sasaran meningkatnya Persentase Usaha Kecil Menengah yang berkualitas sebesar 114,05% lebih tinggi dari capaian tahun 2022.

Dengan dilaksanakan bimbingan dan pelatihan SDM, pelatihan digital marketing, pelatihan inovasi produk, fasilitasi sarana dan prasarana serta fasilitasi perizinan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menyadarkan para pelaku UMKM meningkatkan, mengasah kemampuan dan mengembangkan diri dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat menuju Industri 4.0.

Meningkatnya persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT Tahun 2023 untuk mendukung capaian tujuan yang merupakan sasaran daerah yaitu meningkatkan kegiatan ekonomi sektor tersier, dapat dilihat pada tabel 3.2.

Sesuai data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen untuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Industri Pengolahan di Kebumen pada tahun 2022 sebesar Rp. 7.101.867.110.000 dan tahun 2023 sebesar Rp. 7.954.081.950.000 sehingga diperoleh Prosentase PDRB ADHB Sektor Perindustrian sebesar 12,00%.

$$\text{Prosentase PDRB ADHB Sektor Perindustrian} = \frac{(\text{PDRB ADHB sektor industri pengolahan tahun } (n) - \text{PDRB ADHB sektor industri pengolahan tahun } (n-1))}{\text{PDRB ADHB sektor industri pengolahan tahun } (n-1)} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Prosentase PDRB ADHB Sektor Perindustrian} \\ = \frac{7.954.081.950.000 - 7.101.867.110.000}{7.101.867.110.000} \times 100\% = 12,00\% \end{aligned}$$

Dalam pelaksanaan kinerja Dinas di tahun 2023 mendapat capaian Persentase Peningkatan Prosentase PDRB ADHB sektor Perindustrian sebesar 12,00% capaian lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebesar 5,79%.

Dalam pelaksanaan kinerja Dinas di tahun 2023 mendapat capaian Persentase Peningkatan PDRB sektor Perindustrian sebesar 12,00% capaian lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebesar 5,79%

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT dari data diatas dapat diperoleh dengan menggunakan formulasi Pengukuran, sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% = \frac{12,00}{5,79} \times 100\% = 207,25\%$$

Nilai realisasi target meningkatnya persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT sebesar 12,00% dengan target sebesar 5,79 % maka diperoleh capai indikator kinerja sasaran meningkatnya persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT sebesar 6,21% lebih tinggi dari capaian tahun 2022.

Pada tahun ini, kinerja dinas berhasil mencapai persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan rokok bercukai KIHT sebesar 207,25%. Meskipun target awalnya adalah 49,92%, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha

Kecil dan Menengah berhasil mengoptimalkan sumber daya dan mengatasi tantangan untuk mencapai hasil yang mengesankan. Dengan pertumbuhan sebesar 157,33% telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sektor pertanian dan industri tembakau. Produksi gula semut organik meningkat, menunjukkan komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terhadap produk yang ramah lingkungan dan berkualitas tinggi. Sementara itu, produksi rokok bercukai KIHT juga mengalami peningkatan, menandakan efisiensi dalam manajemen dan distribusi produk. Terbangunnya Kawasan Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Kebumen dan terbentuknya sentra produksi gula semut organik kedepan dapat lebih meningkatkan pertumbuhan perekonomian khususnya di Kebumen dan Indonesia pada umumnya. Sehingga Kebumen menjadi harum di kancah dunia bila produksi gula semut mampu melakukan pemasaran ke mancanegara dengan persyaratan produksi sesuai standar yang berlaku.

Capaian ini setara dengan pencapaian tahun 2022, menunjukkan konsistensi dan ketangguhan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam menghadapi perubahan dan tantangan semoga kedepan dapat terus berinovasi dan memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri gula semut organik dan produksi rokok bercukai KIHT.

Meningkatnya daya saing perdagangan

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya daya saing perdagangan tahun 2023 untuk mendukung capaian tujuan yang merupakan sasaran daerah yaitu meningkatkan kegiatan ekonomi sektor tersier, dapat dilihat pada tabel 3.2.

Sesuai data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen untuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Industri Pengolahan di Kebumen pada tahun 2022 sebesar Rp. 5.248.266.760.000 dan tahun 2023 sebesar Rp. 4.805.470.570.000 sehingga diperoleh Prosentase PDRB ADHB Sektor Perindustrian sebesar 9,21%.

$$\text{Presentase PDRB ADHB Sektor Perdagangan} = \frac{(\text{PDRB ADHB sektor perdagangan besar dan eceran tahun } (n) - \text{PDRB ADHB sektor perdagangan besar dan eceran tahun } (n - 1))}{\text{PDRB ADHB sektor perdagangan besar dan eceran tahun } (n - 1))} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Presentase PDRB ADHB Sektor Perdagangan} \\ = \frac{\text{Rp. 5.248.266.760.000} - 4.805.470.570.000}{4.805.470.570.000} \times 100\% = 9,21\% \end{aligned}$$

Dalam pelaksanaan kinerja Dinas di tahun 2023 mendapat capaian Persentase Peningkatan PDRB sektor Perdagangan sebesar 9,21% capaian masih lebih besar dari target yang telah ditetapkan sebesar 5,14%

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya daya saing perdagangan dari data diatas dapat diperoleh dengan menggunakan formulasi Pengukuran, sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% = \frac{9,21}{5,14} \times 100\% = 179,18\%$$

Nilai realisasi target meningkatnya daya saing perdagangan sebesar 9,21% dengan target sebesar 5,14 % maka diperoleh capai indikator kinerja sasaran meningkatnya daya saing perdagangan sebesar 179,18% lebih tinggi dari capaian tahun 2022 sebesar 101,79%. Peningkatan ini menunjukkan tren positif dalam upaya meningkatkan daya saing perdagangan. Dengan pencapaian yang melebihi target, Kebumen dapat terus memperkuat posisinya di pasar global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 3. 3 Nilai Ekspor Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Tahun	Kurs per \$	Nilai Ekspor Kabupaten Kebumen	
			Dolar	Rupiah
1	2022	Rp 15.200	\$ 2.623.913,78	Rp 39.753.348.625
2	2023	Rp 14.918	\$ 2.348.834,00	Rp 34.867.795.457
	meningkat		\$ 275.079,78	Rp 4.885.553.168

Sumber : Data Surat Keterangan Asal (STA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Tabel 3. 4 Perkembangan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan tahun 2021 dan tahun 2022

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2021				TAHUN 2022				TAHUN 2023			
				T	R	C	K	T	R	C	K	T	R	C	K
1	Meningkatnya Persentase Koperasi Sehat dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang berkualitas	Meningkatnya kegiatan Koperasi sehat	Persentase Koperasi yang sehat	26,67	26,67	100,00	Baik	33,33	36,67	110,02	Sangat Baik	40	83,33	208,33	Sangat Baik
2		Meningkatnya kegiatan UMKM	Persentase Usaha Kecil Menengah yang berkualitas	04.06	04.06	100,00	Baik	10,89	36,67	336,73	Sangat Baik	10,89	12,42	114,05	Sangat Baik
3	Meningkatnya PDRB, ADHB Sektor Perindustrian	Meningkatnya persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT	Persentase Peningkatan PDRB sektor Perindustrian	2,92	2,92	100,00	Baik	6,15	3,07	49,92	Kurang	5,79	12,00	207,25	Sangat Baik
4	Meningkatnya PDRB, ADHB Sektor Perdagangan	Meningkatnya daya saing perdagangan	Persentase Peningkatan PDRB sektor Perdagangan	-3,04	-3,04	100,00	Baik	6,15	6,26	101,79	Sangat Baik	5,14	9,21	179,18	Sangat Baik
	Rata-rata Capaian					100,00	Baik			149,61	Sangat Baik			177,20	Sangat Baik

Keterangan T = Target R = Realisasi C = Capaian% K = Kategori

Tabel 3. 5 Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi;

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target sampai akhir tahun 2026
			T	R	T	R	T	R	
1	Meningkatnya Persentase Koperasi Sehat dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang berkualitas								
	Meningkatnya kegiatan Koperasi sehat	Persentase Koperasi yang sehat	26,67	26,67	33,33	36,67	40	83,33	63,33
2	Meningkatnya kegiatan UMKM	Persentase Usaha Kecil Menengah yang berkualitas	04,06	04,06	10,89	36,67	10,89	12,42	13,22
3	Meningkatnya PDRB, ADHB Sektor Perindustrian								
	Meningkatnya persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT	Persentase Peningkatan PDRB sektor Perindustrian	2,92	2,92	6,15	3,07	5,79	12	4,93
4	Meningkatnya PDRB, ADHB Sektor Perdagangan								
	Meningkatnya daya saing perdagangan	Persentase Peningkatan PDRB sektor Perdagangan	-3,04	-3,04	6,15	6,26	5,14	9,21	4,45

Keterangan T = Target R = Realisasi

Persentase Koperasi yang Sehat adalah ukuran kesehatan dan keberlanjutan koperasi dalam menjalankan aktivitasnya. Pada tahun 2023, persentase ini mencapai 83,33%, menunjukkan kondisi yang baik dalam sektor koperasi di Kabupaten Kebumen. Namun, target hingga akhir tahun 2026 adalah 63,33%, yang menandakan tantangan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan koperasi.

Realisasi Tahun 2023 (83,33%):

1. Pada tahun ini, sebagian besar koperasi beroperasi dengan baik dan memenuhi kriteria kesehatan. Faktor-faktor yang berkontribusi meliputi manajemen yang efisien, keuangan yang stabil, dan partisipasi aktif anggota.
2. Koperasi yang sehat memiliki likuiditas yang cukup, mampu membayar utang tepat waktu, serta memiliki cadangan dana yang memadai.
3. Koperasi juga berfokus pada pengembangan usaha dan pemberdayaan anggota.

Target Hingga Akhir Tahun 2026 (63,33%):

1. Target ini menantang karena mengharuskan koperasi untuk terus memperbaiki kinerja dan menghadapi perubahan lingkungan bisnis.
2. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai target ini meliputi:
 - a. Peningkatan Manajemen: Koperasi harus memiliki manajemen yang efisien dan transparan.
 - b. Pengelolaan Keuangan yang Bijaksana: Memastikan keuangan koperasi sehat dengan mengelola pendapatan, pengeluaran, dan investasi dengan bijaksana.
 - c. Pemberdayaan Anggota: Melibatkan anggota secara aktif dalam pengambilan keputusan dan memberikan pelatihan serta pendampingan.
 - d. Diversifikasi Usaha: Mencari peluang baru dan mengembangkan produk atau layanan yang relevan dengan kebutuhan anggota.

Persentase Usaha Kecil Menengah (UKM) yang Berkualitas menggambarkan sejauh mana kesehatan dan keberlanjutan usaha kecil dan menengah dalam menjalankan aktivitasnya. Mari kita bahas realisasi dan target yang relevan:

Realisasi Tahun 2023 (36,67%):

1. Pada tahun ini, persentase UKM yang berkualitas mencapai 36,67%.
2. Kriteria kualitas UKM melibatkan berbagai aspek, seperti manajemen yang efisien, keuangan yang stabil, dan partisipasi aktif dari pemilik usaha.
3. UKM yang berkualitas memiliki likuiditas yang memadai, mampu membayar utang dengan tepat waktu, serta memiliki cadangan dana yang cukup.

Target Hingga Akhir Tahun 2026 (13,22%):

1. Target ini menantang karena mengharuskan UKM untuk terus memperbaiki kinerja dan menghadapi perubahan lingkungan bisnis.
2. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai target ini meliputi:
 - a. Peningkatan Manajemen: UKM harus memiliki manajemen yang efisien dan transparan.
 - b. Pengelolaan Keuangan yang Bijaksana: Memastikan keuangan UKM sehat dengan mengelola pendapatan, pengeluaran, dan investasi dengan bijaksana.
 - c. Pemberdayaan Pemilik Usaha: Melibatkan pemilik usaha secara aktif dalam pengambilan keputusan dan memberikan pelatihan serta pendampingan.

- d. Diversifikasi Usaha: Mencari peluang baru dan mengembangkan produk atau layanan yang relevan dengan kebutuhan pasar.

Semua pihak terlibat, termasuk pemerintah, lembaga pendukung UKM, dan pemilik usaha, harus bekerja sama untuk mencapai target ini dan memastikan kesehatan serta pertumbuhan UKM di masa depan.

Persentase Peningkatan PDRB sektor Perindustrian menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh sektor industri manufaktur dalam suatu periode tertentu. Berikut penjelasan mengenai realisasi dan target yang relevan:

Realisasi Tahun 2023 (12,00%):

1. Pada tahun ini, sektor perindustrian mencatat pertumbuhan sebesar 12,00% dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ini meliputi investasi, produksi, dan permintaan pasar.
3. Peran penting sektor industri dalam menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja harus terus diperkuat.

Target Hingga Akhir Tahun 2026 (4,93%):

1. Target ini menantang karena mengharuskan sektor perindustrian untuk terus berinovasi dan meningkatkan daya saing.
2. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai target ini meliputi:
 - a. Peningkatan Efisiensi Produksi: Mengoptimalkan proses produksi dan mengurangi pemborosan.
 - b. Diversifikasi Produk: Mencari peluang baru dan mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
 - c. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan.
 - d. Penguatan Riset dan Inovasi: Mendorong riset dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan daya saing.

Semua pihak terlibat, termasuk pemerintah, pelaku industri, dan lembaga pendukung, harus bekerja sama untuk mencapai target ini dan memastikan pertumbuhan sektor perindustrian yang berkelanjutan.

Tabel 3. 6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Persentase Koperasi Sehat dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang berkualitas				
1.1	Meningkatnya kegiatan Koperasi sehat	Persentase Koperasi yang sehat	40	83,33	208,33
1.2	Meningkatnya kegiatan UMKM	Persentase Usaha Kecil Menengah yang berkualitas	10,89	12,42	114,05
2	Meningkatnya PDRB, ADHB Sektor Perindustrian				
2.1	Meningkatnya persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT	Persentase Peningkatan PDRB sektor Perindustrian	5,79	12,00	207,25
3	Meningkatnya PDRB, ADHB Sektor Perdagangan				
3.1	Meningkatnya daya saing perdagangan	Persentase Peningkatan PDRB sektor Perdagangan	5,14	9,21	179,18
	Rata-rata capaian kinerja		15,46	29,24	177,20

Analisis meningkatnya kegiatan Koperasi sehat

Koperasi yang sehat memerlukan manajemen yang profesional, transparansi, dan keberlanjutan dalam memberikan manfaat bagi anggotanya. Pengawasan kepada perkoprasian yang ada secara berkelanjutan, Pelaksanaan RAT koperasi secara rutin dan tepat waktu, peningkatan SDM perkoprasian yang kompeten.

- Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi.
- Meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi serta meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Solusi untuk meningkatkan kesehatan koperasi, berikut beberapa solusi yang dapat diimplementasikan agar Koperasi sehat, sebagai berikut :

1. Manajemen Keuangan yang Efisien:

- Koperasi perlu memiliki manajemen keuangan yang baik. Ini melibatkan pengelolaan pendapatan, pengeluaran, dan investasi dengan cermat.
- Lakukan analisis keuangan secara berkala untuk memastikan koperasi berada pada jalur yang benar.

2. Diversifikasi Usaha:

- Koperasi sehat harus memiliki sumber pendapatan yang beragam. Selain simpan pinjam, pertimbangkan untuk mengembangkan usaha lain seperti perdagangan, jasa, atau produksi.
- Diversifikasi akan membantu mengurangi risiko dan meningkatkan stabilitas keuangan.

3. Peningkatan Keanggotaan dan Partisipasi:

- Aktifkan program perekrutan anggota baru dan berikan insentif bagi anggota yang mereferensikan orang lain.
- Libatkan anggota dalam pengambilan keputusan dan program koperasi. Pertemuan rutin dan forum diskusi dapat meningkatkan partisipasi.

4. Pendidikan dan Pelatihan:

- Berikan pelatihan kepada anggota dan pengurus koperasi tentang manajemen keuangan, pemasaran, dan pengelolaan risiko.
- Pendidikan akan membantu anggota memahami pentingnya kesehatan koperasi dan bagaimana mereka dapat berkontribusi.

5. Transparansi dan Akuntabilitas:

- Publikasikan laporan keuangan secara teratur dan mudah di akses oleh anggota.
- Pastikan pengurus koperasi bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka.

6. Pengembangan Produk dan Layanan:

- Selalu berinovasi dalam produk dan layanan yang ditawarkan. Pertimbangkan kebutuhan anggota dan pasar.

- Produk dan layanan yang relevan akan menarik lebih banyak anggota dan meningkatkan pendapatan.
7. Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Lain:
- Jalin kerjasama dengan bank atau lembaga keuangan lain untuk memperoleh dukungan dalam bentuk pinjaman atau pelatihan.
 - Kemitraan dapat membantu koperasi berkembang lebih baik.

Dengan kerjasama dan komitmen dari anggota, pengurus, dan pihak terkait, koperasi dapat tumbuh dan memberikan manfaat yang lebih baik bagi semua anggotanya

Analisis Meningkatnya kegiatan UMKM

1. Manajemen Keuangan yang Efisien:
 - Pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM bertahan dan tumbuh.
 - Analisis keuangan secara berkala diperlukan untuk memastikan kesehatan finansial.
2. Diversifikasi Usaha:
 - UMKM perlu mengembangkan sumber pendapatan yang beragam.
 - Diversifikasi akan mengurangi risiko dan meningkatkan stabilitas.
3. Pendidikan dan Pelatihan:
 - Pelatihan manajemen, pemasaran, dan pengelolaan risiko akan membantu UMKM meningkatkan kinerja.
 - Pendidikan akan membantu pemahaman tentang pentingnya kesehatan UMKM.
4. Transparansi dan Akuntabilitas:
 - Publikasikan laporan keuangan secara teratur agar anggota dan pemangku kepentingan dapat memantau kinerja.
 - Pengelolaan yang transparan akan membangun kepercayaan.
5. Teknologi dan Inovasi:
 - Manfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.
 - Inovasi produk dan layanan akan menarik lebih banyak pelanggan.
6. Kerjasama dan Jaringan:
 - Kolaborasi dengan UMKM lain dan lembaga keuangan akan membuka peluang baru.
 - Jaringan akan memperluas akses pasar.

Solusi dalam meningkatkan kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar lebih baik, sebagai berikut :

1. Pilih ide bisnis tanpa modal, cari investor, atau sumber pendanaan eksternal.
2. Lakukan riset pasar dan pahami kebutuhan pelanggan.
3. Buat strategi pemasaran yang lebih kuat dan manfaatkan potensi online.
4. Perlu berinovasi untuk tetap relevan dan menarik pelanggan dengan meningkatkan kreativitas dan terus beradaptasi dengan perubahan.
5. Kepuasan pelanggan adalah kunci kesuksesan.
6. Fokus pada layanan pelanggan dan tanggapan positif.
7. Pertimbangkan dengan cermat sebelum mengambil keputusan karena pengambilan keputusan yang buruk dapat berdampak negatif pada bisnis.
8. Pahami regulasi dan cari bantuan dari ahli hukum.

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi di atas UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Meningkatnya persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT

Analisis Agroindustri Gula Semut Organik

Untuk meningkatkan persentase pertumbuhan produksi gula semut organik, berikut beberapa faktor yang perlu dianalisis dan solusi yang dapat diimplementasikan:

1. Pengelolaan Pertanian Organik yang digunakan saat menanam dan pengelolaan lahan sekitar pohon aren/kelapa.
2. Kualitas Bahan Baku aren yang digunakan dalam produksi gula semut.
3. Efisiensi proses produksi gula semut dari tebu atau aren hingga menjadi produk jadi.
4. Strategi pemasaran dan distribusi produk gula semut organik.
5. Pelatihan dan Pengetahuan petani tentang teknik pertanian organik dan produksi gula semut.

Solusi untuk meningkatkan pertumbuhan produksi gula semut organik, sebagai berikut :

1. Perhatikan penggunaan pupuk organik, pengendalian hama dan penyakit secara alami, serta rotasi tanaman.
2. Pastikan bahan baku berkualitas tinggi dan bebas dari pestisida atau bahan kimia berbahaya.

3. Tingkatkan efisiensi dalam proses pemanenan, pengolahan, dan pengemasan atau distributor.
4. Berikan pelatihan dan pendidikan kepada petani mengenai praktik terbaik dalam produksi gula semut organik.

Dengan terbangunnya Kawasan Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Kebumen, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menerapkan langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT :

1. Pengawasan yang Ketat Terhadap Produk Rokok: Koperasi perlu melakukan pengawasan yang konsisten terhadap produk rokok. Hal ini termasuk memastikan kualitas dan keaslian pita cukai. Pengawasan yang ketat akan membantu mengurangi peredaran rokok ilegal dan memastikan produk yang beredar sesuai dengan ketentuan.
2. Optimalisasi Produksi: Dinas harus memastikan bahwa proses produksi rokok berjalan efisien. Peningkatan dalam manajemen produksi, distribusi, dan pengelolaan stok dapat membantu meningkatkan output.
3. Diversifikasi Produk: Selain rokok konvensional, pertimbangkan untuk mengembangkan produk rokok lainnya. Misalnya, rokok elektronik atau varian lain yang sesuai dengan permintaan pasar.
4. Kolaborasi dengan Petani Tembakau: Dinas dapat bekerja sama dengan petani tembakau untuk memastikan pasokan bahan baku yang memadai. Ini termasuk memperhatikan kualitas dan harga bahan baku.
5. Inovasi dalam R&D: Dinas dapat menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam penelitian dan pengembangan (R&D). Inovasi dalam proses produksi, bahan baku, dan desain produk dapat membantu meningkatkan daya saing.
6. Pemahaman tentang Perubahan Kebijakan: Dinas harus memahami perubahan kebijakan terkait cukai rokok. Misalnya, pemahaman tentang kenaikan tarif cukai dan perubahan regulasi akan membantu koperasi beradaptasi.

Solusi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat merencanakan langkah-langkah strategis untuk terus meningkatkan produksi rokok bercukai KIHT.

1. Tren Pertumbuhan: Dalam beberapa tahun terakhir, produksi rokok bercukai KIHT mengalami peningkatan yang signifikan. Data historis menunjukkan bahwa produksi terus meningkat dari tahun ke tahun.

2. Faktor Penyebab Pertumbuhan:

- **Permintaan Pasar:** Permintaan akan rokok bercukai KIHT terus meningkat. Faktor ini mendorong produsen untuk meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan pasar.
- **Efisiensi Produksi:** Perbaikan dalam proses produksi dan manajemen operasional telah membantu meningkatkan output. Penggunaan teknologi modern dan praktik terbaik juga berkontribusi pada pertumbuhan produksi.
- **Kebijakan Pemerintah:** Kebijakan yang mendukung industri tembakau dan cukai dapat mempengaruhi pertumbuhan produksi. Insentif atau regulasi yang menguntungkan produsen rokok bercukai KIHT dapat memacu pertumbuhan.

3. Potensi Tantangan:

- **Regulasi:** Perubahan dalam regulasi cukai atau ketentuan terkait rokok dapat mempengaruhi produksi. Koperasi perlu memantau perubahan ini dengan cermat.
- **Persaingan:** Industri rokok bercukai KIHT memiliki persaingan yang ketat. Produsen harus terus berinovasi untuk mempertahankan pangsa pasar.
- **Bahan Baku:** Ketersediaan bahan baku tembakau dapat membatasi pertumbuhan produksi. Koperasi perlu menjaga hubungan baik dengan petani tembakau.

4. Strategi Masa Depan:

- **Diversifikasi Produk:** Selain rokok bercukai KIHT, pertimbangkan untuk mengembangkan produk lain yang relevan dengan pasar.
- **Peningkatan Kualitas:** Fokus pada kualitas produk dapat membantu memperkuat citra merek dan meningkatkan permintaan.
- **Ekspansi Pasar:** Eksplorasi pasar baru dan ekspansi ke wilayah yang belum terjangkau dapat membuka peluang pertumbuhan.

Meningkatnya daya saing perdagangan

Dalam upaya meningkatkan daya saing perdagangan di Kabupaten Kebumen, beberapa faktor perlu dianalisis dan diperhatikan:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Kuat:

Perekonomian yang tumbuh positif akan memperkuat daya saing perdagangan. Investasi dalam infrastruktur dan sektor manufaktur dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

2. Diversifikasi Pasar Ekspor:

Mencari pasar ekspor yang beragam akan mengurangi ketergantungan pada satu negara atau komoditas. Perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral dapat membuka peluang baru.

3. Efisiensi dan Inovasi:

Efisiensi dalam produksi dan distribusi akan meningkatkan daya saing. Teknologi modern dan inovasi akan membantu memperkuat posisi di pasar.

4. Dukungan UMKM:

Dukungan pemerintah untuk UMKM melalui insentif fiskal dan kemudahan izin berusaha akan memperkuat daya saing. UMKM harus berkontribusi dalam perdagangan internasional.

Solusi dalam meningkatnya daya saing perdagangan :

1. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, seperti investasi dalam infrastruktur dan pengembangan sektor manufaktur.
2. Pertahankan stabilitas ekonomi dan terus tingkatkan produktivitas sektor-sektor utama
3. Pemerintah perlu memperkuat tata kelola dan mengurangi birokrasi yang memperlambat proses perdagangan.
4. Pelaku bisnis perlu mengadopsi teknologi dan praktik terbaik untuk meningkatkan efisiensi.
5. Pemerintah perlu berinvestasi dalam infrastruktur yang mendukung konektivitas dan efisiensi.
6. Pemerintah perlu memastikan kebijakan yang mendukung perdagangan dan mengurangi hambatan.
7. Cari peluang di pasar global yang belum tergarap dan manfaatkan perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral.
8. Dukungan pemerintah untuk UMKM melalui insentif fiskal, kemudahan izin berusaha, dan akses pasar akan memperkuat daya saing.
9. Terus dorong UMKM untuk berkontribusi dalam perdagangan internasional.

Tabel 3. 7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	Tujuan Strategis						
	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah						
	SASARAN						
	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder						
	Meningkatnya Persentase Koperasi Sehat dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang berkualitas						
A	Meningkatnya kegiatan Koperasi sehat	Persentase Koperasi yang sehat	208,33%	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	99,37%	Menunjang
1				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi akuntabel	99,37%	Menunjang
B				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	95,96%	Menunjang
1				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang diselenggarakan	95,96%	Menunjang
C				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Advokasi kepada Koperasi	96,28%	Menunjang

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	96,28%	Menunjang
D	Meningkatnya kegiatan UMKM	Persentase Usaha Kecil Menengah yang berkualitas	336,73%	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas	94,76%	Menunjang
1				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang terbina	94,76%	Menunjang
E				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang Meningkatkan Omsetnya	96,02%	Menunjang
1				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UKM yang meningkat skala usahanya	96,02%	Menunjang
	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier						
	Meningkatnya PDRB, ADHB Sektor Perindustrian						
F	Meningkatnya persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT	Persentase Peningkatan PDRB sektor Perindustrian	207,25%	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Produksi Gula Kelapa dan Rokok Bercukai	99,23%	Menunjang
1				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Industri yang terbina	99,23%	Menunjang
G				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN	Persentase Dokumen	99,01%	Menunjang

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Perijinan yang Terfasilitasi		
1				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perijinan industri yang terfasilitasi	99,01%	Menunjang
H				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Dokumen Informasi Industri	99,09%	Menunjang
1				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Data Industri	99,09%	Menunjang
	Meningkatnya PDRB, ADHB Sektor Perdagangan						
I	Meningkatnya daya saing perdagangan	Persentase Peningkatan PDRB sektor Perdagangan	179,18%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94,40%	Menunjang
1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun + jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	98,90%	Menunjang
2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	95,16%	Menunjang
3				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah kegiatan diklat dalam satu tahun	98,57%	Menunjang

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
4				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	98,72%	Menunjang
5				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	97,88%	Menunjang
6				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79,32%	Menunjang
7				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional atau lapangan + jumlah unit peralatan dan mesin lainnya terpelihara	99,77%	Menunjang
J				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Nilai Pendapatan Retribusi Pasar	98,14%	Menunjang
1				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	98,16%	Menunjang
2				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan dan pemberdayaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	97,82%	Menunjang
K				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Inflasi Barang Kebutuhan Pokok pada Pasar	99,46%	Menunjang
1				Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah	Jumlah kegiatan pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan	99,27%	Menunjang

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Kabupaten/ Kota	barang Penting		
2				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah hari pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	99,66%	Menunjang
L				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Perdagangan	99,47%	Menunjang
1				Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Promosi Pengembangan Usaha Produk Ekspor	99,47%	Menunjang
M				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang Tertera	98,80%	Menunjang
1				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal	98,80%	Menunjang
N				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Pemasaran Produk UMKM	99,07%	Menunjang
1				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah kegiatan Pemasaran Produk dalam negeri	99,07%	Menunjang

3.2. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, melaksanakan 14 (empat belas) program, 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 37.620.802.850,00 yang terdiri dari ;

- 1) Urusan Perindustrian anggaran sebesar Rp. 1.621.000.000,-
- 2) Urusan Perdagangan anggaran sebesar Rp. 22.462.837.000,- yang terbagi lagi menjadi
 1. Urusan Perdagangan Rp. 11.205.949.000,-
 2. Unsur Penunjang Perdagangan Rp. 11.256.888.000,-
- 3) Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah anggaran sebesar Rp. 11.256.888.000,-

Realisasi total anggaran belanja keuangan adalah sebesar Rp. 36.415.504.369,- atau 96,80%. dari total anggaran sebesar Rp. 37.620.802.850,- dengan capaian realisasi fisik dan realisasi keuangan pada skala kategori penilaian Baik.

Untuk realisasi anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023, tertuang dalam tabel 3.8 dan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 3.

Tabel 3. 8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan tahun 2023 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	36.378.382.850	35.182.912.158	96,71
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.637.584.000	4.431.430.196	95,55
I	<i>Meningkatnya jumlah Koperasi yang sehat</i>			
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	20.000.000	19.874.700	99,37
1.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	20.000.000	19.874.700	99,37
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	277.287.000	266.081.564	95,96
2.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi	277.287.000	266.081.564	95,96

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	445.730.000	429.165.134	96,28
3.1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	445.730.000	429.165.134	96,28
II	Meningkatnya jumlah UMKM yang berkualitas			
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.836.560.000	1.740.302.449	94,76
4.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.836.560.000	1.740.302.449	94,76
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.058.007.000	1.976.006.349	96,02
5.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.058.007.000	1.976.006.349	96,02
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	31.740.798.850	30.751.481.962	96,88
III	Meningkatnya PDRB ADHB Sektor Perdagangan			
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.050.281.850	10.431.303.699	94,40
6.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.554.000	48.021.425	98,90
6.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.934.024.850	9.453.701.962	95,16
6.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.000.000	34.499.500	98,57
6.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.600.000	177.304.270	98,72
6.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000	19.575.000	97,88
6.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	650.395.000	515.912.945	79,32
6.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.708.000	182.288.597	99,77
7	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	19.333.696.000	18.974.281.612	98,14
7.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	18.377.407.000	18.038.801.155	98,16
7.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	956.289.000	935.480.457	97,82
8	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	218.227.000	217.039.173	99,46
8.1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	114.544.000	113.705.372	99,27
8.2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	103.683.000	103.333.801	99,66

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
9	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	325.366.000	323.644.489	99,47
9.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	325.366.000	323.644.489	99,47
10	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	173.754.000	171.671.936	98,80
10.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	173.754.000	171.671.936	98,80
11	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	639.474.000	633.541.053	99,07
11.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	639.474.000	633.541.053	99,07
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.242.420.000	1.232.592.211	99,21
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.242.420.000	1.232.592.211	99,21
12	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.118.500.000	1.109.864.013	99,23
12.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.118.500.000	1.109.864.013	99,23
13	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	80.366.000	79.572.295	99,01
13.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	80.366.000	79.572.295	99,01
14	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	43.554.000	43.155.903	99,09
14.1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	43.554.000	43.155.903	99,09
Jumlah Total		37.620.802.850	36.415.504.369	96,80

Total anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tahun 223 sebesar Rp. 37.620.802.850,- terealisasi sebesar Rp. 36.415.504.369,- atau 96,80%, sisa anggaran Rp. 1.205.298.481,- atau 3,20% dari total pagu anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Sisa belanja Gaji dan tunjangan sebesar Rp 478.650.871,- atau 1,27% dari total pagu anggaran, karena ASN Purna tugas, Mutasi Ke instansi lain, pengembalian tunjangan fungsional tertentu karena belum diberlakukan sesuai peraturan terbaru, luran BPJS Kesehatan, BPJS

JKK dan BPJS JKM, insentif pemungut retribusi, TPP karena sesuai realisasi kelas jabatan.

- 2) Sisa belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tidak terserap sebesar Rp 134.120.455,- atau 0,36% total anggaran karena belanja Listrik Pusat Kuliner Jalan Merdeka belum bisa dibayarkan untuk tagihan bulan desember 2023 dan belanja listrik kantor, Dekranasda, PLUT, UPTD dan pasar sesuai kebutuhan,
- 3) Sisa belanja Program Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota sebesar Rp 8.635.987,- atau 0,02% terdiri dari belanja perjalanan dinas, belanja BBM, ATK, Sisa Tender pembangunan KIHT, Sisa Belanja Hibah.
- 4) Sisa belanja Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan sebesar Rp 338.605.845,- atau 0,90% dari pagu, terdiri dari Sisa Tender Pembangunan Pusat Kuliner Alun-alun Tahap I dan Tahap II, jaringan listrik, BBM Pengangkutan sampah, ATK, belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Narasumber, .
- 5) Sisa belanja Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian sebesar Rp 11.205.436,- atau sebesar 0,03% dari total pagu terdiri dari Belanja Tenaga Laboratorium, Belanja Honor P2K purna tugas dan terangkat P3K, Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya, Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba.
- 6) Sisa Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil sebesar

Bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen sebagai salah satu Organisasi Pemerintah Daerah yang mampu atau memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah yaitu Pendapatan dari Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi tempat khusus parkir, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang. Adapun dalam tahun 2023 target pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp.12.850.746.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.857.084.575,- (92,27 %) dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3. 9 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Kebersihan Pasar, Retribusi tempat khusus parkir, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pelayanan Tera/ tera Ulang

No	Pendapatan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Retribusi Pelayanan Pasar	7,133,818,000	6,182,901,389	86.67	7.529.001.000	6.230.853.615	82,76
2	Retribusi Kebersihan Pasar	542.025.000	586.168.300	108,14	542.024.000	604.853.400	111,59
3	Retribusi tempat khusus parkir	3,520,657,000	3,831,968,300	108.84	4.555.074.600	4.694.142.600	103,05
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	15,000,000	30,113,200	200.75	109.727.000	160.709.460	146,46
5	Retribusi Pelayanan Tera/ tera Ulang	70.000.000	117,611,500	164,63	90.000.000	138.915.500	154,35
6	Retribusi Pelayanan Penginapan/ pesanggrahan/villa	24,920,000	26,740,000	107.30	24.920.000	27.610.000	110,79
7	Retribusi Pasar grosir dan/atau pertokoan	60.998.000	111.613.200	182,98	0	0	0
	Total	11.367.418.000	10.856.955.189	95,51	12.850.746.600	11.857.084.575	92,27

a. Retribusi Pelayanan Pasar

Pada Pos Retribusi Pelayanan Pasar, target penerimaan tahun 2023 sebesar Rp. 7.529.001.000,- dapat terealisasi Rp. 6.230.853.615,- atau 82,76 %.

b. Retribusi Kebersihan Pasar

Pada Pos Retribusi Kebersihan Pasar, target penerimaan tahun 2023 sebesar Rp. 542.024.000,- dapat terealisasi Rp. 604.853.400,- atau 111,59 %.

c. Retribusi tempat khusus parkir

Pada Pos Retribusi tempat khusus parkir, target penerimaan tahun 2023 sebesar Rp. 4.555.074.600,- dapat terealisasi Rp. 4.694.142.600,- atau 103,05%.

d. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah target penerimaan tahun 2023

sebesar Rp. 109.727.000,- dapat terealisasi Rp. 160.709.460,- atau 146,46%.

e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang target penerimaan tahun 2023

sebesar Rp. 90.000.000,- dapat terealisasi Rp. 138.915.500,- atau 154,35%.

- f. Retribusi Pasar grosir dan/atau pertokoan target penerimaan tahun 2023 sebesar Rp. 0,- dapat terealisasi Rp. 0,- atau 0,00%.
- g. Retribusi Pelayanan Penginapan/ pesanggrahan/villa target penerimaan tahun 2023 sebesar Rp. 24.920.000,- dapat terealisasi Rp. 27.610.000,- atau 110,79%.

Dari tujuh objek pendapatan retribusi di atas, terdapat satu objek yang tidak tercapai 100 %, yaitu Retribusi Pelayanan Pasar hanya mencapai 82,76 % hal ini disebabkan :

- a) Untuk pendapatan retribusi pelayanan pasar belum maksimal karena sebagian besar adanya kios dan los yang tidak aktif berjualan (Tutup dan tidak aktif berjualan) hal ini berpengaruh terhadap penurunan penerimaan retribusi pelayanan pasar. Untuk retribusi kios dan los terdapat tunggakan pedagang sehingga berpengaruh terhadap penurunan penerimaan pendapatan.
- b) Pasca pembatasan kegiatan masyarakat dan pasca pandemi covid 19 sehingga berpengaruh terhadap kunjungan pembeli sehingga pasar menjadi sepi, untuk yang los maupun lesehan yang buka harian menjadi banyak yang tutup. Dikarenakan banyak masyarakat lebih menyukai berbelanja secara online dari pada di pasar tradisional, karena lebih murah dan tidak ribet, yang berimbas kepada pendapatan retribusi seperti sewa ruko/kios dan loos karena banyak yang tidak digunakan untuk kegiatan transaksi jual beli.
- c) Gedung pertemuan/penginapan mengalami penurunan pengguna, karena biaya sewa gedung pemerintah lebih tinggi.

1. Target dan Realisasi Belanja

Secara umum dari anggaran belanja yang ditargetkan sebesar Rp. 36.378.382.850,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 35.182.912.158,- atau 96,71%.

Belanja terdiri belanja Operasi dan belanja Modal, dengan rinciannya sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi sebagaimana telah ditetapkan dalam APBD Perubahan tahun 2023 sebesar Rp. 21.384.387.850,- terserap sebesar Rp 20.499.130.219,- atau 95,86 % meliputi belanja sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 9.901.879.850,- terserap sebesar Rp. 9.419.898.479,- atau 95,13%.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 8.979.490.000,- dan dapat terserap sebesar Rp. 8.713.235.620,- atau 97,03%.

3) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi dianggarkan sebesar Rp. 0,- dan dapat terserap sebesar Rp. 0,- atau 0,00%.

4) Belanja Hibah

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp. 611.829.000,- terserap sebesar Rp. 593.987.220,- atau 97,08%.

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp. 1.891.189.000,- terserap sebesar Rp. 1.772.008.900,- atau 93,70%.

b. Belanja Modal

Bagian Belanja Modal seperti yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 16.236.415.000,- terserap sebesar Rp. 15.751.596.150,- atau 97,01% meliputi belanja sebagai berikut :

1). Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 1.618.306.000,- terserap sebesar Rp. 1.577.871.650,- atau 97,50%.

2). Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp. 12.817.971.000,- dan dapat terserap sebesar Rp. 12.386.224.500,- atau 96,63%.

3). Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dianggarkan sebesar Rp 1.800.138.000,- dan dapat terserap sebesar Rp. 1.787.500.000,- atau 99,30%.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen melaksanakan 14 program untuk 22 kegiatan dan 41 sub kegiatan dari anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen tahun 2023, juga melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari APBN DPHCHT yaitu :

Tabel 3.10. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana dari APBN DBHCHT di wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2023

NO	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	Pengembangan Gudang Sentra Hasil Tembakau	Petanahan	APBN (DBHCHT)	Pembangunan Gedung SIHT Pagu Rp 669.000.- Realisasi Rp 668.967.000,- (99,995%)
2	Pengawasan Pembangunan Gedung Dan Bangunan SIHT	Petanahan	APBN (DBHCHT)	Pengawasan Pembangunan Gedung Dan Bangunan SIHT pagu 10.000.000,- realisasi sebesar Rp. 9.435.000,- (94,35 %)
	Perencanaan DED Pembangunan Gedung Tahap 2 dan Jembatan SIHT	Petanahan	APBN (DBHCHT)	Perencanaan DED Pembangunan Gedung Tahap 2 dan Jembatan SIHT pagu Rp 30.000.000 ,- dan realisasi Rp 29.082.000,- (96,94%)

3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%.

Berdasarkan perhitungan efisiensi capaian kinerja program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 terhadap realisasi anggaran sebesar 23,53%. Yaitu dengan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\sum_{i=1}^n ((\text{PAKi} \times \text{CKi}) - \text{RAKi})}{\sum_{i=1}^n (\text{PAKi} \times \text{CKi})} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{((\text{Pagu Anggaran Keluaran i} \times \text{Capaian Keluaran i}) - \text{Realisasi Anggaran Keluaran i})}{(\text{Pagu Anggaran Keluaran i} \times \text{Capaian Keluaran i})} \times 100\%$$

PAKi = Pagu Anggaran Keluaran i

CKi = Capaian Keluaran i

RAKi = Realisasi Anggaran keluaran i

Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dan Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini.

**Tabel 3.11 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023**

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)	Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=((6*5)-7)	10=6*5	11=(9/10)* 100)
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH					75.241.605.700	72.831.008.738	96,80%	22.085.748.785	93.876.369.661	23,53%
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	40	33,33	83,33%	20.000.000	19.874.700	99,37%	3.209.700	16.665.000	19,26%
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi akuntabel	80	174	217,50%	20.000.000	19.874.700	99,37%	23.625.300	43.500.000	54,31%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	23,71	32,06	135,22%	277.287.000	266.081.564	95,96%	108.858.175	374.939.739	29,03%
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang diselenggarakan	4	4	100,00%	277.287.000	266.081.564	95,96%	11.205.436	277.287.000	4,04%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Advokasi kepada Koperasi	29,59	40,25	136,03%	445.730.000	429.165.134	96,28%	177.142.149	606.307.283	29,22%
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	120	161	134,17%	445.730.000	429.165.134	96,28%	168.855.949	598.021.083	28,24%
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas	10,89	13,9	127,64%	1.836.560.000	1.740.302.449	94,76%	603.883.410	2.344.185.859	25,76%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)	Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=((6*5)-7)	10=6*5	11=(9/10)* 100)
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang terbina	308	1.460	474,03%	1.836.560.000	1.740.302.449	94,76%	6.965.468.980	8.705.771.429	80,01%
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang Meningkatkan Omsetnya	40	91	227,50%	2.058.007.000	1.976.006.349	96,02%	2.705.959.576	4.681.965.925	57,80%
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UKM yang meningkat skala usahanya	225	307	136,44%	2.058.007.000	1.976.006.349	96,02%	832.029.869	2.808.036.218	29,63%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100,00%	11.050.281.850	10.431.303.699	94,40%	618.978.151	11.050.281.850	5,60%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun + jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	16	16	100,00%	48.554.000	48.021.425	98,90%	532.575	48.554.000	1,10%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12	12	100,00%	9.934.024.850	9.453.701.962	95,16%	480.322.888	9.934.024.850	4,84%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah kegiatan diklat dalam satu tahun	8	8	100,00%	35.000.000	34.499.500	98,57%	500.500	35.000.000	1,43%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12	12	100,00%	179.600.000	177.304.270	98,72%	2.295.730	179.600.000	1,28%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	7	7	100,00%	20.000.000	19.575.000	97,88%	425.000	20.000.000	2,13%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)	Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=((6*5)-7)	10=6*5	11=(9/10)* 100)
	pemerintah daerah									
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	100,00%	650.395.000	515.912.945	79,32%	134.482.055	650.395.000	20,68%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional atau lapangan + jumlah unit peralatan dan mesin lainnya terpelihara	66	78	118,18%	182.708.000	182.288.597	99,77%	33.639.039	215.927.636	15,58%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Nilai Pendapatan Retribusi Pasar	12,42	11,857	95,47%	19.333.696.000	18.974.281.612	98,14%	516.984.231	18.457.297.381	2,80%
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	8	8	100,00%	18.377.407.000	18.038.801.155	98,16%	338.605.845	18.377.407.000	1,84%
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan dan pemberdayaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	8	8	100,00%	956.289.000	935.480.457	97,82%	20.808.543	956.289.000	2,18%
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Inflasi Barang Kebutuhan Pokok pada Pasar	1,5	9,14	609,33%	218.227.000	217.039.173	99,46%	1.112.690.680	1.329.729.853	83,68%
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	329	329	100,00%	114.544.000	113.705.372	99,27%	838.628	114.544.000	0,73%
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah hari pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok	365	365	100,00%	103.683.000	103.333.801	99,66%	349.199	103.683.000	0,34%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)	Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=((6*5)-7)	10=6*5	11=(9/10)* 100)
	dan barang Penting									
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Perdagangan	2000	39753,35	1987,67%	325.366.000	323.644.489	99,47%	6.143.549.749	6.467.194.238	95,00%
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Promosi Pengembangan Usaha Produk Ekspor	2	2	100,00%	325.366.000	323.644.489	99,47%	1.721.511	325.366.000	0,53%
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang Tertera	58,88	87,34	148,34%	173.754.000	171.671.936	98,80%	86.067.099	257.739.035	33,39%
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal	3.035	4.452	146,69%	173.754.000	171.671.936	98,80%	83.205.431	254.877.367	32,65%
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Pemasaran Produk UMKM	70,27	99,19	141,16%	639.474.000	633.541.053	99,07%	269.111.943	902.652.996	29,81%
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah kegiatan Pemasaran Produk dalam negeri	6	4	66,67%	639.474.000	633.541.053	99,07%	-207.225.053	426.316.000	-48,61%
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Produksi Gula Kelapa dan Rokok Bercukai	15,13	26,33	174,03%	1.118.500.000	1.109.864.013	99,23%	836.606.906	1.946.470.919	42,98%
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Industri yang terbina	300	300	100,00%	1.118.500.000	1.109.864.013	99,23%	8.635.987	1.118.500.000	0,77%
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perijinan yang Terfasilitasi	100	100	100,00%	80.366.000	79.572.295	99,01%	793.705	80.366.000	0,99%
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri	Jumlah dokumen perijinan industri yang terfasilitasi	60	60	100,00%	80.366.000	79.572.295	99,01%	793.705	80.366.000	0,99%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)	Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=((6*5)-7)	10=6*5	11=(9/10)* 100)
(IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota										
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Dokumen Informasi Industri	1	1	100,00%	43.554.000	43.155.903	99,09%	398.097	43.554.000	0,91%
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Data Industri	1	1	100,00%	43.554.000	43.155.903	99,09%	398.097	43.554.000	0,91%

Sumber data : Dinas Diolah

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2023 untuk mencapai target kinerja Tahun 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut :

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

1. Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya kegiatan Koperasi sehat tahun 2023, dengan indikator kinerja Persentase Koperasi yang sehat tercapai 208,33% dengan kategori sangat baik. Didukung 3 program dengan capaian indikator program rata – rata 118,19% dengan kategori sangat baik, dan 3 kegiatan dengan capaian indikator kegiatan mencapai 100 % dengan kategori baik.
2. Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya kegiatan UMKM tahun 2023, dengan indikator kinerja Persentase Koperasi yang sehat tercapai 336,73% dengan kategori sangat baik. Didukung 2 program dengan capaian indikator program rata – rata 241,40% dengan kategori sangat baik, dan 4 kegiatan dengan capaian indikator kegiatan mencapai 100 % dengan kategori baik.
3. Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT tahun 2023, dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan PDRB sektor Perindustrian 207,25% dengan kategori sangat tinggi. Didukung 2 program dengan capaian indikator program rata – rata 112,34% dengan kategori sangat baik, dan 4 kegiatan dengan capaian indikator kegiatan mencapai 100 % dengan kategori baik.
4. Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya daya saing perdagangan tahun 2023, dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan PDRB sektor Perdagangan tercapai 179,18% dengan



kategori kurang. Didukung 6 program dengan capaian indikator program rata – rata 221,70% dengan kategori sangat baik, dan 14 kegiatan dengan capaian indikator kegiatan mencapai 102,25%% dengan kategori sangat baik.

5. Dari hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengeluaran Pencapaian sasaran dapat disimpulkan bahwa prosentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) dari tiap-tiap sasaran mencapai 100%.
6. Untuk mendukung apa yang telah ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 telah disediakan Anggaran Belanja Sebesar Rp. 37.620.802.850,- (Tigapuluh Tujuh Miliar Enam Ratus Duapuluh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Delapan ratus Lima puluh Rupiah) dan pada pelaksanaan kegiatannya terserap dana sebesar Rp. 36.415.504.369,- (Tigapuluh Enam Miliar Empat ratus Limabelas Juta Lima Ratus Empat Ribu Tigaratus Enampuluh Sembilan Rupiah) atau 96,80 %.

Secara umum semua rencana tingkat capaian (target) dari tiap-tiap kegiatan yang ditetapkan dapat direalisasikan sesuai dengan rencana. Hal ini dapat diambil suatu analisa tingkat efisiensi masing-masing kegiatan dengan membandingkan indikator, input, output, dan outcome yang dihasilkan baik.

Dari hasil pencapaian kinerja yang baik dari tiap-tiap kegiatan tersebut tidak terlepas dari adanya faktor pendukung yang antara lain :

1. Adanya perencanaan yang baik dan terarah dari masing-masing pelaksanaan kegiatan baik dari persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan.
2. Adanya kesiapan sumber daya manusia (SDM) baik sebagai subjek maupun objek dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Terjalinnya koordinasi yang baik dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

4.2. Permasalahan/Kendala

Permasalahan/ kendala yang dihadapi tidak tercapainya kinerja sasaran program dan kegiatan diantaranya:

1. Refocusing pagu anggaran yang tidak diikuti perubahan target kinerja program dan kegiatan, dimana target kinerja program dan kegiatan berdasarkan Renstra;
2. Kurang cermatnya penjabaran anggaran kas;
3. Perubahan kebijakan dan peraturan, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan tidak sesuai target;
4. Jumlah pegawai yang semakin berkurang tentunya mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga perlu penambahan pegawai baik di tingkat kabupaten ataupun kecamatan/Unit Pelaksana Teknis Dinas.

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja yang Akan Datang

Berdasarkan permasalahan dan kendala pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 mendukung upaya capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kegiatan Koperasi sehat, dengan indikator kinerja persentase Koperasi yang sehat, pada Tahun 2023 dengan melaksanakan program dan kegiatan secara optimal dengan Penguatan Manajemen Koperasi, Diversifikasi Produk dan Layanan, Peningkatan Kualitas Pelayanan, Kemitraan dan Kolaborasi, Penggunaan Teknologi melalui program berikut :

- 1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan melaksanakan kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota bagi SDM perkoperasian yang kompeten.
- 3) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.



Program dan kegiatan Tahun 2023 mendukung upaya capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kegiatan UMKM, dengan indikator Persentase Usaha Kecil Menengah yang berkualitas, pada tahun 2023 dengan melaksanakan program dan kegiatan secara optimal dengan penguatan kemitraan, pendataan dan analisis, pelatihan dan edukasi, fasilitasi perizinan, dan pengembangan kelembagaan melalui program berikut :

- 1) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dengan melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
- 2) Program Pengembangan UMKM dengan melaksanakan kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

Program dan kegiatan Tahun 2023 mendukung upaya capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kegiatan UMKM, dengan indikator Persentase Usaha Kecil Menengah yang berkualitas, pada tahun 2023 melaksanakan program dan kegiatan secara optimal dengan penguatan kemitraan, pendataan dan analisis, pelatihan dan edukasi, fasilitasi perizinan, dan pengembangan kelembagaan melalui program berikut :

- 1) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan melalui kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya;
- 2) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting melalui kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota;
- 3) Program Pengembangan Ekspor melalui kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi



Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;

- 4) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen melalui kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan;
- 5) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri melalui kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Program dan kegiatan Tahun 2023 mendukung upaya capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT, dengan indikator Persentase Peningkatan PDRB sektor Perindustrian, pada tahun 2023 dengan melaksanakan program dan kegiatan secara optimal dengan penguatan kemitraan, pendataan dan analisis, pelatihan dan edukasi, fasilitasi perizinan, dan pengembangan kelembagaan melalui program berikut :

- 1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Nasional melalui kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
- 2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota melalui kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional melalui kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen di tahun mendatang, perlu ditingkatkan koordinasi intern dan ekstern dalam pelaksanaan kegiatan sehingga bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan mencari solusinya agar kegiatan-kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan target dan realisasi kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.



Selain program dan kegiatan pendukung capaian sasaran tentunya program dan kegiatan pendukung capaian kinerja yang lainnya juga perlu direncanakan dan dilaksanakan secara optimal untuk mencapai target yang telah ditentukan. Permasalahan yang terjadi perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang dengan cara meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan dengan melibatkan stakeholder terkait serta perlunya dilakukan sistem pengendalian yang memadai, meningkatkan inovasi dan kreativitas untuk mengembangkan potensi sumber daya yang ada, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia

Demikian laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 yang dapat kami susun sesuai dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dengan harapan semoga bermanfaat bagi semua pihak.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN



Drs. UDY CAHYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196702261986071001



LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1.	Perjanjian Kinerja Perubahan II Tahun 2023
Lampiran 2.	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023
Lampiran 3.	Target, Realisasi Fisik Dan Keuangan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan HM. Sarbini No. 89 Kebumen, Kodepos 54316, Telepon (0287) 384434, Faksimile (0287) 384434
Laman disperindag.kebumenkab.go.id, Pos-el disperindag@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs UDY CAHYONO, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ARIF SUGIYANTO, SH

Jabatan : Bupati Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

H. ARIF SUGIYANTO, SH

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs UDY CAHYONO, M.Si
NIP. 196702261986071001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Triwulan			
				sebelum	sesudah	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan : Meningkatnya Kegiatan ekonomi Sektor sekunder								
1	Meningkatkan presentase koperasi sehat dan usaha kecil Menengah yang berkualitas	Persentase Koperasi Sehat	%	33,33	33,33				33,33
		Persentase Usaha Kecil Menengah yang Berkualitas	%	10,27	10,27				10,27
2	Meningkatnya PDRB ADHB Sektor Perindustrian	Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perindustrian	%	6,15	6,15				6,15
	Tujuan : Meningkatnya Kegiatan ekonomi Sektor tersier								
3	Meningkatnya PDRB ADHB Sektor Perdagangan	Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perdagangan	%	5,42	5,42				5,42

NO.	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN *	KETERANGAN
1.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	20.000.000	20.000.000	
2.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoprasian	255.318.000	277.287.000	
3.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	445.730.000	445.730.000	
4.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	1.741.560.000	1.836.560.000	
5.	Program pengembangan UMKM	1.646.555.000	2.058.007.000	
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.256.888.000	11.050.281.850	
7.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	10.128.771.000	19.333.696.000	
8.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	207.178.000	218.227.000	
9.	Program Pengembangan Ekspor	100.000.000	325.366.000	
10.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	170.000.000	173.754.000	
11.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	600.000.000	639.474.000	
12.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.148.000.000	1.118.500.000	
13.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	73.000.000	80.366.000	
14.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	40.000.000	43.554.000	

Kebumen, 27 Oktober 2023

Bupati Kebumen

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
H. ARIF SUGIYANTO, SH



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Drs UDY CAHYONO, M.Si
NIP. 19670226 198607 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan HM. Sarbini No. 89 Kebumen, Kodepos 54316, Telepon (0287) 384434, Faksimile (0287)384434
Laman disperindag.kebumenkab.go.id, Pos-el disperindag@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : EKO WIDIYANTORO, S.E., S.ST.M.Si.
Jabatan : Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs UDY CAHYONO, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

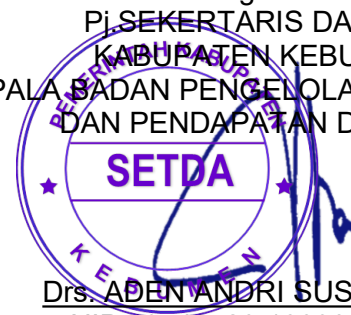
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Drs UDY CAHYONO, M.Si
NIP. 19670226 198607 1 001

Kebumen, 27 Oktober 2023
Pihak Pertama,

EKO WIDIYANTORO, S.E., S.ST.M.Si.
NIP. 19710810 199503 1 001

Mengetahui
PI SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si
NIP.19740529 199303 1 001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Triwulan			
				sebelum	sesudah	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya PDRB ADHB Sektor Perdagangan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosen	100	100				100

NO.	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN *	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.256.888.000	11.050.281.850	

Kebumen, 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah


Drs UDY CAHYONO, M.Si
NIP. 19670226 198607 1 001

Sekertaris
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah


EKO WIDIYANTORO, S.E., S.ST.M.Si.
NIP. 19710810 199503 1 001

Mengetahui
Pj.SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH


Drs ADEN ANDRI SUSILO, M.Si
NIP. 19740529 199303 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan HM. Sarbini No. 89 Kebumen, Kodepos 54316, Telepon (0287) 384434, Faksimile (0287)384434
Laman disperindag.kebumenkab.go.id, Pos-el disperindag@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : TRI YANTO, S.KM., M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs UDY CAHYONO, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Drs UDY CAHYONO, M.Si
NIP. 19670226 198607 1 001

Pihak Pertama,

TRI YANTO, S.KM., M.Si
NIP. 19671127 199401 1 001

Mengetahui
Pj.SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH


Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si
NIP. 19740529 199303 1 001



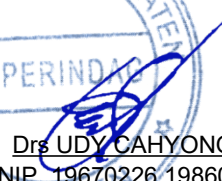
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Triwulan			
				sebelum	sesudah	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perindustrian	Jumlah Industri yang terbina	Orang	80	80	20	20	20	20
		Jumlah dokumen perijinan Industri yang terfasilitasi	Dokumen	150	150	50	50	25	25
		Jumlah dokumen Data Industri	Dokumen	1	1				1

NO.	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN *	KETERANGAN
1.	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.148.000.000	1.118.500.000	
2.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	73.000.000	80.366.000	
3.	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000	43.554.000	

Kebumen, 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen



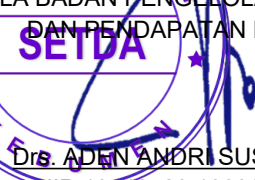
Drs UDY CAHYONO, M.Si
NIP. 19670226 198607 1 001

Kepala Bidang Perindustrian
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen



TRI YANTO, S.KM., M.Si
NIP. 19671127 199401 1 001

Mengetahui
P. SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH



Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si
NIP. 19740529 199303 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan HM. Sarbini No. 89 Kebumen, Kodepos 54316, Telepon (0287) 384434, Faksimile (0287)384434
Laman disperindag.kebumenkab.go.id, Pos-el disperindag@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : RUD TOMICO EL UMAM, S.H.M.H.
Jabatan : Kepala Bidang Sarana Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs UDY CAHYONO, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Drs UDY CAHYONO, M.Si
NIP. 19670226 198607 1 001

Kebumen, 27 Oktober 2023

Pihak Pertama,

RUD TOMICO EL UMAM, S.H.M.H.
NIP. 19880125 201101 1 005

Mengetahui
Pj. SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH


Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si
NIP. 19740529 199303 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Triwulan			
				sebelum	sesudah	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	Unit	8	8				8
		Jumlah Pembinaan dan pemberdayaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan	8	8				8

NO.	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN *	KETERANGAN
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	9.226.341.000	18.377.407.000	
2.	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	902.430.000	956.289.000	

Kebumen, 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kebumen



Drs. UDY CAHYONO, M.Si
NIP. 19670226 198607 1 001

Kepala Bidang Sarana Perdagangan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen



RUD TOMICO EL UMAM, S.H.M.H.
NIP. 19880125 201101 1 005

Mengetahui
Pj. SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH



Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si
NIP. 19740529 199303 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan HM. Sarbini No. 89 Kebumen, Kodepos 54316, Telepon (0287) 384434, Faksimile (0287)384434
Laman disperindag.kebumenkab.go.id, Pos-el disperindag@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : BASORI, S.IP.

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustri,
Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs UDY CAHYONO, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

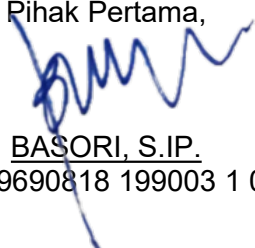
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

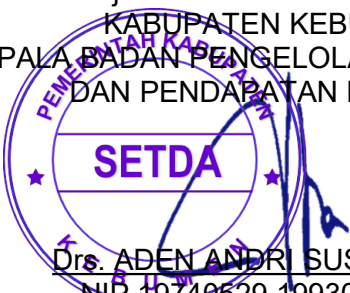
Pihak Kedua,

Drs UDY CAHYONO, M.Si
NIP. 19670226 198607 1 001

Kebumen, 27 Oktober 2023

Pihak Pertama,

BASORI, S.IP.
NIP. 19690818 199003 1 007

Mengetahui
Pj. SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH


Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si
NIP. 19740529 199303 1 001



*Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
LKjIP Tahun 2023*

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Triwulan			
				sebelum	sesudah	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perdagangan	Jumlah kegiatan pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	Kali	277	277	69	69	70	60
		Jumlah hari pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	Hari	365	365	91	91	92	91
		Jumlah Pembinaan dan Promosi Pengembangan Usaha Produk Ekspor	(Kegiatan)	2	2	0	1	1	0
		Jumlah kegiatan Pemasaran Produk dalam negeri	(Kegiatan)	4	4	1	1	1	1

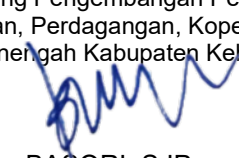
NO.	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN *	KETERANGAN
1.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	107.178.000		
2.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100.000.000		
3.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000		
4.	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	600.000.000		

Kebumen, 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen


Drs. UDY CAHYONO, M.Si
NIP. 19670226 198607 1 001

Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen


BASORI, S.I.P.
NIP. 19690818 199003 1 007

Mengetahui
Pj. SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH


Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si
NIP. 19740529 199303 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan HM. Sarbini No. 89 Kebumen, Kodepos 54316, Telepon (0287) 384434, Faksimile (0287)384434
Laman disperindag.kebumenkab.go.id, Pos-el disperindag@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DANANG DWI HARTANTO, S.STP, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dina
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs UDY CAHYONO, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 27 Oktober 2023



Pihak Kedua,

Drs UDY CAHYONO, M.Si
NIP. 19670226 198607 1 001

Pihak Pertama,

DANANG DWI HARTANTO, S.STP, M.Si
NIP. 19840201 200212 1 001

Mengetahui
PI SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH



Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si
NIP.19740529 199303 1 001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Triwulan			
				sebelum	sesudah	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Koperasi Sehat	Jumlah koperasi akuntabel	Unit	80	80				80
		Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang diselenggarakan	Kegiatan	10	10				10
		Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Unit	60	60				60
2	Persentase Usaha Kecil Menengah yang Berkualitas	Jumlah usaha mikro yang terbina	Unit	283	283				283
		Jumlah UKM yang meningkat skala usahanya	Unit	100	100				100

NO.	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN *	KETERANGAN
1.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	20.000.000	20.000.000	
2.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	255.318.000	277.287.000	
3.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	445.730.000	445.730.000	
4.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.741.560.000	1.836.560.000	
5.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.646.555.000	2.058.007.000	

Kebumen, 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen



Drs. UDY CAHYONO, M.Si
NIP. 19670226 198607 1 001

Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Kebumen

DANANG DWI HARTANTO, S.STP, M.Si
NIP. 19840201 200212 1 001

Mengetahui

PI SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH



Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si
NIP. 19740529 199303 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan HM. Sarbini No. 89 Kebumen, Kodepos 54316, Telepon (0287) 384434, Faksimile (0287)384434
Laman disperindag.kebumenkab.go.id, Pos-el disperindag@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

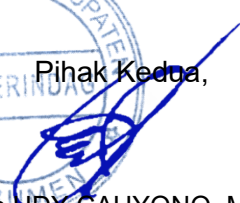
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : RAHMAWATI, A.Md.
Jabatan : Kepala UPTD METROLOGI LEGAL Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs UDY CAHYONO, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Drs UDY CAHYONO, M.Si
NIP. 19670226 198607 1 001

Kebumen, 27 Oktober 2023

Pihak Pertama,

RAHMAWATI, A.Md.
NIP. 19690704 199003 2 008

Mengetahui
P. SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si
NIP.19740529 199303 1 001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Triwulan			
				sebelum	sesudah	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perdagangan	Jumlah pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal	Unit	2.780	2.780				2.780

NO.	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
1.	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	170.000.000	173.754.000	

Kebumen, 27 Oktober 2023

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
KEBUMEN**



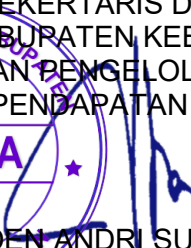
Drs. UDY CAHYONO, M.Si
NIP. 19670226 198607 1 001

**Kepala UPTD METROLOGI LEGAL
DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
KEBUMEN**



RAHMAWATI, A.Md.
NIP. 19690704 199003 2 008

Mengetahui
Pj. SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH



Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si
NIP. 19740529 199303 1 001

